

Majalah

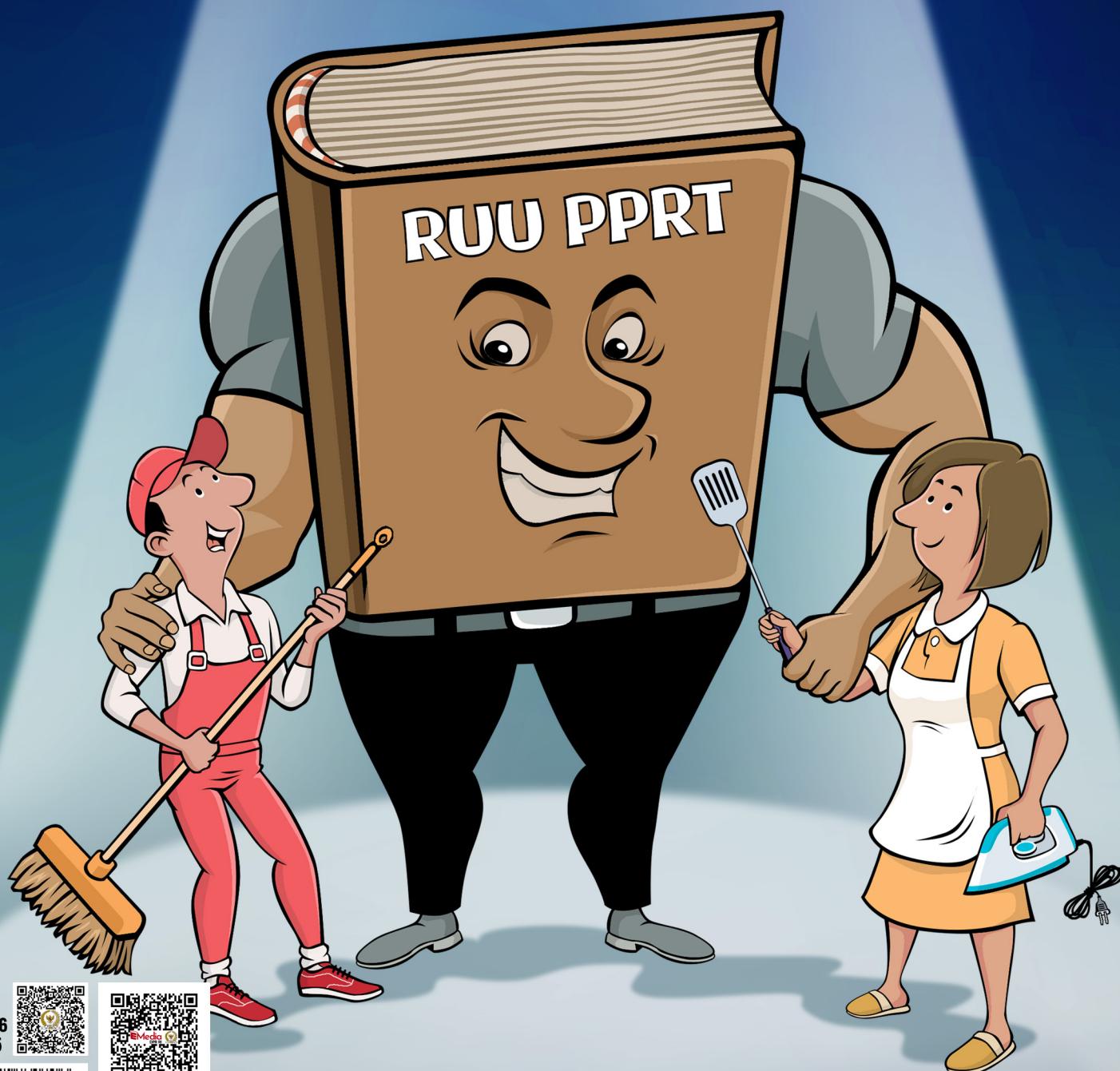


Biro Pemberitaan Parlemen

PARLEMENTARIA

RUU PPRT

Mengangkat Martabat PRT



EDISI 246
TH. 2025



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom, M.A. (Kasubag Analis Media)

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos, M.A. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Muhammad Husen, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Agung Hidayat, Ridwan Budiman, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF, Devi Iriandi

ANALIS MEDIA

Suplan, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, Darmawan

PENERBITAN**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

LAPORAN UTAMA

4

RUU PPRT Mengangkat Martabat PRT

4

PROLOG

RUU PPRT Mengangkat Martabat PRT

6

LAPORAN UTAMA

- Titik Terang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
- RUU PPRT Jadi Langkah Historis
- Memberi Pelindungan Formal Bagi PRT

14

SUMBANG SARAN

RUU PPRT: Tantangan Kelembagaan di Tingkat Lokal

18

PENGAWASAN

Cek Kesehatan Gratis 2025 Menggapai Hingga Pelosok Negeri

20

ANGGARAN

Optimisme Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen

22

LEGISLASI

Menyusun Kembali Fondasi Pendidikan Nasional

24

FOTO BERITA

28

PROFIL

Herman Khaeron
Menjaga Arah Perjalanan Bangsa



PENGAWASAN



Cek Kesehatan Gratis 2025 Menggapai Hingga Pelosok Negeri

18

ANGGARAN



Optimisme Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen

20

SOROTAN



DPR Gugat Dominasi Aplikator Ojol

58

- 32 KUNKER**
- 58 SOROTAN**
DPR Gugat Dominasi Aplikator Ojol
- 60 LIPUTAN KHUSUS**
Membangun Kerja Sama Anggota BRICS
- 62 DAPIL**
- 70 PERNIK**
TVR Program Raih Penghargaan Internasional
- 72 KIAMAT SEHAT**
Manfaat Donor Darah Masyarakat
- 74 WISATA**
Labuan Bajo dan Cerita Lautnya
- 76 LEMBA PARLE**
Iduladha Wujud Kepedulian Sosial dan Kebahagiaan Bersama

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri

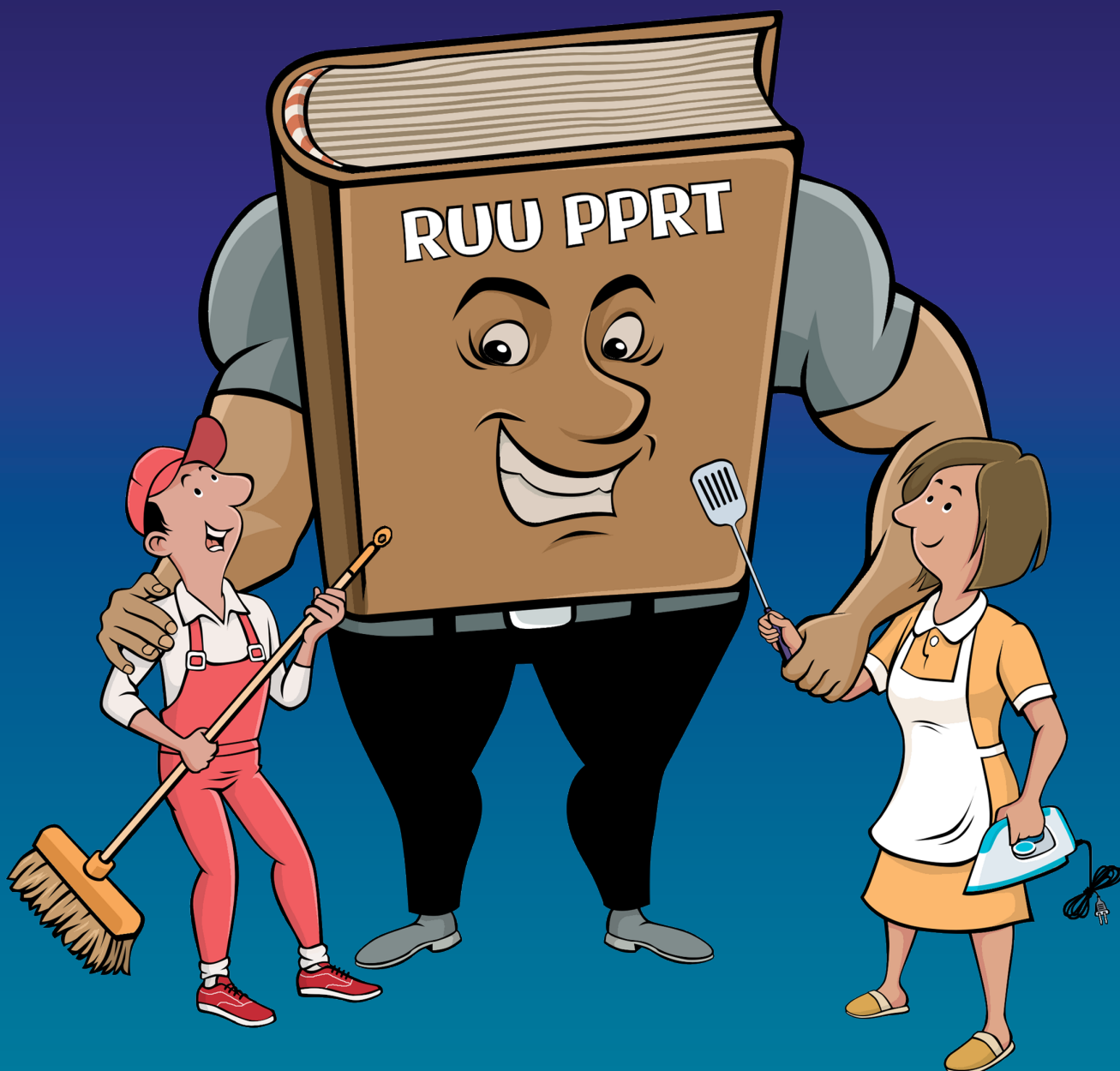


@dpr_ri

www.dpr.go.id

RUU PPRT Mengangkat Martabat PRT

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional, ada sekelompok pekerja yang selama ini berjalan dalam senyap, menopang kehidupan domestik jutaan rumah tangga: Pekerja Rumah Tangga (PRT). Mereka bekerja tanpa jam pasti, tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan seringkali tanpa pengakuan sebagai pekerja yang sah.





PADAHAL, kehadiran mereka tak tergantung dalam keseharian keluarga Indonesia. Namun, hingga

hari ini, PRT masih berada di wilayah abu-abu hukum ketenagakerjaan. Mereka tak dilindungi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga tidak memiliki perjanjian kerja standar, jaminan sosial, atau kejelasan atas hak-hak normatif. Situasi inilah yang mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)—sebuah inisiatif yang mengusung prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan pengakuan atas kerja layak.

Mengapa RUU PPRT Mendesak?

RUU PPRT bukan sekadar regulasi teknis. Ia adalah instrumen pengakuan terhadap martabat kemanusiaan. Indonesia memiliki lebih dari 4 juta pekerja rumah tangga, sebagian besar perempuan, bahkan ada yang masih anak-anak. Tanpa regulasi, mereka rawan mengalami kekerasan, eksploitasi, pengupahan yang tidak adil, dan jam kerja yang tidak manusiawi.

RUU PPRT menyusun kerangka pelindungan yang mencakup pengakuan status pekerja, hak atas perjanjian kerja tertulis, jam kerja wajar, akses jaminan sosial, dan hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat.

RUU ini juga membuka ruang pelatihan dan sertifikasi, sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme dan kualitas hidup PRT.

Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi HAM dan hak pekerja, meskipun belum secara resmi meratifikasi Konvensi ILO No.189 tentang

“

RUU PPRT bukan sekadar melindungi. Ia mengangkat harkat dan martabat.

Kerja Layak bagi PRT. Namun, semangat dan substansi RUU PPRT selaras dengan amanat konvensi tersebut, dan menjadi bukti bahwa Indonesia tengah bergerak menuju ketertinggalan legislasi global di bidang pelindungan pekerja informal.

Jalan Panjang Legislasi RUU PPRT

RUU PPRT bukan isu baru. Inisiatif pembentukan undang-undang ini telah bergulir sejak tahun 2004. Bahkan, sejak 2010, RUU ini telah masuk dalam Prolegnas. Namun, perjalanannya penuh liku. Pergantian periode keanggotaan DPR, dinamika politik, serta minimnya kesepahaman antarpemangku kepentingan menyebabkan RUU ini beberapa kali tertunda dan batal dibahas lebih lanjut.

Baru pada tahun 2020, melalui dorongan masyarakat sipil, akademisi, dan jaringan advokasi PRT, RUU ini kembali masuk dalam pembahasan di Baleg DPR RI. Tahun 2023 menjadi titik penting ketika DPR RI menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Namun, hingga 2024, pembahasannya masih menunggu Surat Presiden (Supres) sebagai bentuk persetujuan resmi dari pemerintah untuk memulai pembahasan bersama.

Dorongan publik terus menguat. Aliansi masyarakat sipil, organisasi buruh, tokoh lintas agama, hingga tokoh-tokoh bangsa menyuarakan satu tuntutan: sahkan RUU PPRT. Bahkan, Presiden sendiri sempat menyatakan komitmennya atas

urgensi regulasi ini. Namun, janji politik harus dibuktikan dalam bentuk nyata: dimulainya pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk melahirkan undang-undang yang adil bagi PRT.

Menjawab Amanat Konstitusi

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." RUU PPRT adalah implementasi nyata dari amanat konstitusi tersebut. Negara harus hadir, bukan hanya dalam melindungi pekerja sektor formal atau industri besar, tetapi juga dalam relasi sosial domestik yang kerap tersembunyi dari radar perlindungan hukum.

DPR RI kini memegang peran kunci. Melalui kerja-kerja di Baleg dan komisi terkait, serta dukungan lintas fraksi, pengesahan RUU ini dapat menjadi warisan legislatif yang menunjukkan keberpihakan nyata pada kelompok rentan. Dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan sosialisasi yang masif, kekhawatiran pemberi kerja juga dapat dijawab dengan kejelasan aturan dan prinsip keadilan.

RUU PPRT bukan sekadar melindungi. Ia mengangkat harkat dan martabat. Ia membuka ruang dialog antara pemberi kerja dan pekerja. Ia membangun ekosistem kerja domestik yang lebih manusiawi dan adil. Dan yang terpenting, ia menjadi tonggak sejarah: bahwa negara tidak lagi abai terhadap pekerja yang selama ini berada di bayang-bayang.

Kini, saatnya kita semua bergerak bersama. Untuk mendengar suara-suara yang selama ini terbungkam. Untuk menegakkan martabat yang selama ini diabaikan. Untuk memastikan, tak ada satu pun pekerja rumah tangga yang bekerja tanpa perlindungan. RUU PPRT harus segera disahkan! 🏡

Titik Terang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Setelah penantian panjang dan perdebatan intensif selama hampir dua dekade terakhir, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kini kembali menjadi pembahasan di DPR RI.

RUU yang diharapkan menjadi payung hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia ini, menjanjikan pelindungan komprehensif, mulai dari kepastian upah, jam kerja, hingga jaminan sosial, serta penegasan pengakuan PRT sebagai pekerja profesional yang setara.



INILAH

momentum penting mengangkat martabat para PRT sederat dengan para pekerja lainnya. Relasi kerja

dengan majikan (pemberi kerja) juga didesain setara dan profesional. Para PRT kini diakui secara legal formal. Ia sudah setara dengan para pekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Walau bekerja di wilayah privat, ia tetap mendapat hak-haknya sebagai pekerja.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan, DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU PPRT pada tahun ini. Aspek pelindungan bagi PRT dalam negeri menjadi poin utama yang akan diprioritaskan.

"Maka sudah barang pasti di Indonesia sendiri, di dalam negeri kita harus juga melaksanakan satu rancangan undang-undang

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memimpin rapat kerja Baleg DPR RI.





Tak hanya kepastian hukum bagi PRT, RUU PPRT juga akan memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara pemberi kerja, penyalur dan PRT itu sendiri.

Bob Hasan
Ketua Baleg DPR RI

yang tentunya mengarah kepada perlindungan juga bagi pekerja yang ada di Republik Indonesia ini. Pekerjaanya bukan pekerja formal dalam konteks ini adalah pekerja sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai pekerja rumah tangga," tegas Bob Hasan.

Bob Hasan mengatakan bahwa pembahasan RUU PPRT sudah pernah dimulai, tetapi belum tuntas. Sementara, DPR sendiri telah menyelesaikan regulasi



Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memimpin rapat kerja Baleg DPR RI.

untuk perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal itu, menurutnya, semakin menegaskan urgensi menyusun aturan hukum bagi PRT yang bekerja di dalam negeri. "Nah sebenarnya hal inilah yang menjadi satu pemicu kita, dan kemudian perlindungan ini juga harus terbentuknya satu kepastian hukum," tegasnya.

Tak hanya kepastian hukum bagi PRT, RUU PPRT juga akan memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara pemberi kerja, penyalur, dan PRT itu sendiri. Hubungan hukum antara ketiganya bersifat tripartit atau tiga pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Untuk itu perlu diatur secara tegas untuk menjamin hak dan kewajiban semua pihak. "Intinya adalah protection, ya. Pelindungan yang ingin kita capai dalam konteks hubungan kerja. Dalam perspektif hukum, itu

disebut *rechtsbetrekking*, yaitu hubungan hukum," ujarnya.

Baleg sendiri menargetkan pembahasan RUU PPRT akan rampung pada tiga atau empat bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berjanji bersama DPR akan segera merampungkan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang.

Oleh karenanya, Baleg mendorong keterlibatan dan partisipasi publik agar pengaturan dalam RUU PPRT dapat memperhatikan aspek sosial dan budaya, serta memberikan ruang untuk pelatihan berkelanjutan dan pengawasan implementasi undang-undang di masa mendatang.

Baleg DPR RI selalu terbuka terhadap masukan publik dan akan terus memperluas partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU PPRT. **bia/mh**

RUU PPRT Jadi Langkah Historis

Inilah kali pertama para pekerja rumah tangga (PRT) mendapat perlindungan hukum formal dalam bentuk undang-undang. DPR RI sedang merumuskan UU yang kelak mengangkat martabat para PRT. Regulasi ini juga akan melindungi para PRT yang bekerja di luar negeri. Inilah langkah historis penting untuk menjaga para PRT dari kekerasan, pelecehan, dan “kerja paksa” tanpa mendapat upah.

Anggota Baleg DPR RI Longki Djanggola dalam RDPU Baleg DPR RI bersama Ketua Komnas HAM, Ketua Komnas Perempuan, dan Dr. Sabina Satriyani Puspita dari Monash University Indonesia.



FOTO: GERALDI/VEL



ANGGOTA

Badan Legislasi
(Baleg) DPR
RI Longki
Djanggola,
menyebut
Rancangan
Undang-
Undang tentang

Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai langkah historis dalam mengakui eksistensi dan hak PRT. RUU ini tidak boleh sekadar simbol hukum yang tidak aplikatif.

Longki menyampaikan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan akademisi dari Monash University Indonesia, di Gedung Nusantara I DPR RI, akhir Mei lalu.

Longki menyampaikan sebelas catatan penting untuk memperkuat substansi RUU PPRT. Pertama, penggunaan istilah "hubungan sosio-kultural" dalam Pasal 1 ayat 3, yang dinilai multitafsir dan

mengaburkan status PRT sebagai pekerja. Ia mengusulkan agar hubungan kerja ditegaskan sebagai relasi industrial yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan nasional dan internasional.

Kedua, ia mengeritik celah hukum dalam perjanjian kerja yang tidak tertulis. Longki meminta seluruh bentuk perekrutan PRT mensyaratkan perjanjian kerja tertulis dengan format baku dan pendampingan dari lembaga negara, seperti Dinas Ketenagakerjaan atau RT/RW yang sudah diberi pelatihan. Ketiga, asas kekeluargaan yang menjadi dasar perlindungan dalam RUU ini dinilai memperlemah posisi PRT. "Relasi kerja harus didasari atas kesetaraan hukum, bukan normatif-kultural," ujarnya.

Keempat, Longki menyoroti legalisasi penyalur PRT. Ia mengingatkan potensi penyalahgunaan sistem ini tanpa pengawasan yang ketat, dan mendesak peran aktif negara melalui kementerian dan Pemda dalam proses rekrutmen. Kelima, ia menilai RUU ini masih lemah dalam mekanisme penegakan hukum. Penyelesaian konflik cenderung dipusatkan pada mediasi tanpa jalur hukum yang jelas. Ia mengusulkan pencantuman mekanisme pengawasan, pelaporan, serta pemberian sanksi pidana dan administratif.

Keenam, mengenai jaminan sosial yang dibebankan kepada PRT. Longki menilai hal ini tidak adil dan mengusulkan agar negara dan pemberi kerja menanggung jaminan sosial, terutama untuk PRT penuh waktu. Ketujuh, ia menyoroti absennya ketentuan waktu kerja dan standar upah minimum.

Menurutnya, perlu ada klausul eksplisit tentang batas waktu kerja maksimal, hak libur, serta ketentuan upah minimum yang disesuaikan dengan UMP daerah.

"Tanpa ketentuan itu, PRT

berisiko dieksploitasi dengan waktu kerja panjang dan upah rendah," jelasnya.

Catatan kedelapan berkaitan dengan lemahnya pengaturan soal upah layak dan kesetaraan. Pasal 11 huruf d hanya menyebutkan upah berdasarkan kesepakatan, tanpa dasar angka konkret. Longki lalu menekankan pentingnya ketentuan bahwa upah tidak boleh lebih rendah dari UMP serta wajib mencakup tunjangan hari raya, libur, dan lembur.

Kesembilan, ia mengeritik kewajiban administratif PRT untuk melapor ke RT/RW sebagai bentuk



RUU ini masih lemah dalam mekanisme penegakan hukum. Penyelesaian konflik cenderung dipusatkan pada mediasi tanpa jalur hukum

Longki Djanggola
Anggota Baleg DPR RI

beban tambahan yang tidak seimbang. "Wajib lapor seharusnya ditujukan pada pemberi kerja. Sediakan sistem digital melalui dinas ketenagakerjaan," katanya. Kesepuluh, mengenai sanksi, Longki meminta agar ada pasal khusus terkait sanksi pidana, perdata, dan administratif terhadap pelanggaran hak PRT, termasuk kasus kekerasan dan pelecehan.

Terakhir, ia menegaskan pentingnya perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Ia mendorong ada pasal khusus tentang mekanisme pengaduan dan perlindungan darurat yang mudah diakses oleh korban. **hal/mh**

Memberi Pelindungan Formal Bagi PRT

Urgensi pembahasan Rancangan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) seolah tak terbantahkan. Meningkatnya kasus kekerasan, eksploitasi, dan ketidakadilan yang menimpa para pekerja rumah tangga (PRT) menjadi cerminan lemahnya pelindungan hukum di sektor domestik.



ESENSI RUU PPRT bukan sekadar menyusun norma ketenagakerjaan formal, melainkan mengangkat

kembali harkat dan martabat para PRT yang selama ini menjadi lapisan pekerja paling rentan, namun sering terabaikan. RUU ini adalah pernyataan bahwa negara hadir untuk memanusiakan mereka, bukan hanya sebagai tenaga kerja tetapi sebagai manusia utuh yang memiliki hak, kehormatan, dan pelindungan yang setara.

Anggota Baleg DPR RI Sarifuddin Sudding menilai bahwa pembahasan RUU PPRT merupakan momentum strategis bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189. Dengan ratifikasi tersebut, ia berharap posisi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pekerja informal, baik di dalam maupun luar negeri, semakin kuat.

"Ini memang akan menjadi momentum yang baik untuk kita melakukan ratifikasi terhadap (Konvensi) ILO 189 untuk melakukan pemenuhan dan pelindungan

hak-hak para pekerja rumah tangga," tegasnya saat rapat dengan sejumlah pihak di Jakarta, akhir Mei lalu.

Konvensi ILO 189 menetapkan standar kerja layak bagi pekerja rumah tangga, termasuk hak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan pelindungan sosial. Menurutnya, selama belum ada ratifikasi, posisi pelindungan PRT, khususnya pekerja migran di luar negeri, menjadi sangat lemah.

Ia juga menyoroti kontradiksi kebijakan nasional yang di satu sisi menjamin hak asasi manusia melalui UU No.39/1999, namun di sisi lain masih mengabaikan pelindungan terhadap pekerja rumah tangga.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Baleg DPR RI Andi Yuliani Paris menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menyusun RUU PPRT adalah bagaimana merumuskan

pelindungan hukum tanpa menegasikan realitas sosial yang selama ini melekat dalam relasi antara PRT dan pemberi kerja.



Anggota Baleg DPR RI Longki Djanggola



Anggota Baleg DPR RI Andi Yuliani Paris.

“

Tantangan terbesar dalam menyusun RUU PPRT adalah bagaimana merumuskan perlindungan hukum tanpa menegasikan realitas sosial yang selama ini melekat

Andi Yuliani Paris
Anggota Baleg DPR RI

Relasi ini seringkali bersifat personal, bahkan kekeluargaan. Banyak keluarga memperlakukan PRT sebagai bagian dari rumah, memberi ruang fleksibilitas dalam bekerja, dan berbagi kehidupan sehari-hari. “Yang penting itu, dalam pengaturannya nanti jangan sampai menghilangkan hubungan kekeluargaan. Itu yang selama ini menjadi nilai sosial yang hidup,” ujar politisi Fraksi PAN ini.

Yuliani menegaskan bahwa pengaturan yang terlalu kaku dalam RUU justru bisa merusak jalinan

sosial yang telah terbentuk. Namun demikian, nilai kekeluargaan tidak boleh menjadi pembenar untuk mengabaikan hak-hak dasar pekerja. Fleksibilitas sosial tidak boleh menutupi kekerasan yang dilegitimasi atas nama keluarga.

Dalam kasus tertentu, hubungan kekeluargaan memang menciptakan kondisi kerja yang baik. Namun, banyak pula kasus di mana dalih kekeluargaan justru digunakan untuk menutup praktik eksploitasi: tidak digaji layak, tidak ada hari libur, hingga tidak bebas keluar rumah. Hubungan personal yang semu tidak bisa dijadikan pengganti perlindungan hukum yang nyata.

Senada dengan Yuliani, Anggota Baleg DPR RI, Anna Mu'awanah juga

menyampaikan bahwa RUU PPRT haruslah menjadi instrumen yang memanusiakan manusia, bukan justru alat eksploitasi baru, baik terhadap pekerja maupun pemberi kerja. “Pada dasarnya, ini ide yang sangat bagus untuk ‘wong ke wong’. Tapi mari kita diskusikan agar ini bukan menjadi suatu eksploitasi,” ujar Anna.

Meski begitu, ia juga mengingatkan agar regulasi tidak memberatkan pemberi kerja dengan aturan yang dibuat terlalu formal dan rigid. Hal ini dikhawatirkan menyulitkan pelaksanaan di lapangan, misalnya dalam penetapan standar penghasilan yang berimplikasi pada kewajiban perpajakan atau administrasi rumit lainnya.

Namun, ia juga menegaskan bahwa cara memanusiakan manusia itu bermacam-macam. Memberi upah layak, jam kerja wajar, dan lingkungan kerja aman adalah bentuk paling dasar dari penghormatan atas kemanusiaan PRT. Kebaikan individu tidak bisa menjadi alasan untuk membiarkan ketidakadilan sistemik terus berlangsung.

Saat ini pekerja rumah tangga di Indonesia sebagian besar bekerja tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan sosial, tanpa batas waktu kerja yang jelas. Mereka kerap berada di ruang privat yang tertutup dari pantauan hukum. **uc/mh**



Anggota Baleg DPR RI Anna Mu'awanah.

RUU PPRT

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

1

RUU PPRT telah diajukan sejak tahun 2004 dan terus menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di berbagai periode

2

Menjadi RUU carry over dari periode sebelumnya

3

Merupakan RUU Inisiatif DPR

4

Fokus pada Pekerjaan Layak sejalan dengan Tujuan SDG's



Urgensi Pengesahan

- Menempatkan pekerja rumah tangga (PRT) sederajat dengan jenis dan bentuk pekerja lainnya dari segi pengawasan, perlindungan, dan lain-lain.
- Menjadi jawaban pemerintah atas pertanyaan dunia internasional terkait perlindungan bagi mereka yang bekerja di sektor domestik tersebut.
- Diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan hak kerja bagi para PRT di dalam negeri.
- Dapat memberi nilai tambah bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri bahwa Indonesia telah memiliki jaminan aturan bagi para PRT.
- Diharapkan Indonesia dapat menuntut negara lain untuk memperlakukan pekerja migran Indonesia seperti yang negara Indonesia lakukan pula (asas resiprositas).



Bob Hasan
Ketua BALEG DPR RI

SEJARAH PEMBAHASAN RUU PPRT:

Awal Tahun 2000-an : Gagasan untuk memiliki payung hukum bagi pekerja rumah tangga mulai mengemuka.

1

2010 : Dorongan untuk mengesahkan RUU PPRT semakin kuat dari berbagai pihak.

3

2004 : Naskah akademik RUU PPRT pertama kali diajukan.

2

2020-an : RUU PPRT kembali menjadi perhatian. Presiden Jokowi sempat memberikan instruksi agar RUU ini segera disahkan.

4

5

Awal 2023 : Masuk kembali dalam daftar Prolegnas DPR.

6

2025 : Kembali dibahas di Badan Legislasi DPR.

7

Juni 2024 : Masih dalam tahap pembahasan di DPR.

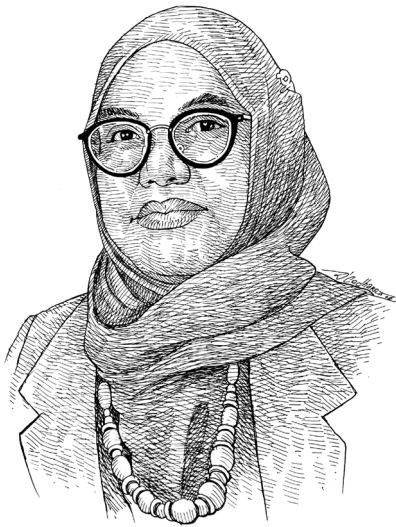
Hak PRT:

- Upah Layak dan THR
- Jam kerja yang manusiawi
- Istirahat dan libur
- Cuti
- Jaminan sosial
- Pendidikan dan pelatihan
- Rasa aman dari eksploitasi

Poin-poin Penting:

- Pengakuan sebagai pekerja
- Kepastian hukum
- Mencegah konflik
- Melindungi dari kekerasan dan eksploitasi
- Meningkatkan harkat dan martabat
- Jaminan Kesejahteraan





Oleh:
Ida Ruwaida
Dosen FISIP
Universitas Indonesia

RUU PPRT: Tantangan Kelembagaan di Tingkat Lokal

RUU PPRT (Pelindungan Pekerja Rumah Tangga) belum juga diketok palu oleh DPR RI, padahal, sudah 20 tahun digodok. Banyak pertanyaan atas lamanya proses legislasi RUU tersebut, padahal sudah beberapa kali masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas).

Relevansi dan urgensi undang-undang tentu berdasar kondisi nyata, yakni berbagai kasus kekerasan yang dialami PRT baik yang 'live in' (tinggal bersama majikan) maupun 'live-out' (tidak tinggal bersama majikan). Adapun bentuk kekerasannya bukan hanya ekonomi (upah dan tunjangan yang tidak layak), namun juga psikis (kekerasan verbal, diperlakukan tidak manusiawi, diancam, dan lainnya), maupun fisik (dipukul, disiksa, dan lainnya). Bahkan, kekerasan seksual.

Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena lemahnya posisi tawar PRT, apalagi statusnya sekadar pembantu, dan umumnya tidak didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan tertulis. Relasi yang terbangun lebih dianggap sosial, bukan relasi kerja. Bahkan, ada majikan atau pemberi kerja yang memposisikan PRT sebagai 'anggota keluarga', apalagi jika PRT direkrut berbasis jaringan kekerabatan, pertemanan, dan atau kesamaan

daerah asal, bahkan latar etnis, agama, atau identitas lainnya.

Pertanyaan publik adalah mengapa RUU PPRT hingga 20

tahun belum juga diundangkan? Secara sosiologis ada yang menarik, karena RUU PPRT tidak terlalu intens dan massif menstimuli pro-kontra di masyarakat, sebagaimana RUU Pornografi, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), bahkan RUU Kesehatan. Berbagai RUU tersebut, dalam proses legislasinya menunjukkan adanya proses politik, yakni kontestasi bahkan konflik berbasis perbedaan nilai atau cara pandang. Walaupun ada pro kontra dalam proses legislasi RUU PPRT di parlemen khususnya, lebih karena perbedaan kepentingan, baik yang bernuansa politis maupun bias kelas.

Hal yang terakhir, tercermin dari pandangan sebagian legislator yang berposisi kritis, bahkan mempertanyakan urgensi RUU PPRT. Bias yang dimaksud adalah mereka lebih merepresentasikan kepentingan pribadi sebagai majikan (pemberi kerja). Pada dasarnya,



RUU PPRT tidak terlalu intens dan massif menstimuli pro-kontra di masyarakat, sebagaimana RUU Pornografi, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), bahkan RUU Kesehatan.



sudah menjadi rahasia umum bahwa derajat ke-seksi-an substantif, konon juga melatari derajat keseriusan, kesigapan, serta kecepatan (durasi waktu) dalam memproses perundangan.

Artinya, apakah RUU PPRT dianggap sangat tidak 'seksi', sehingga sudah 20 tahun berjalan, belum juga disahkan? Atau masih ada pasal-pasal yang masih perlu diperjelas, bahkan diperdebatkan? Atau masih ada keraguan apakah UU PPRT ini dapat diimplementasikan secara efektif? Secara sosiologis, pertanyaan mendasar adalah apakah UU PPRT merupakan intervensi struktural sekaligus kultural? Artinya, undang undang ini diharapkan mampu mentransformasi bukan hanya cara pandang majikan atas PRT, dan sebaliknya, namun juga terbangun relasi yang setara, bermartabat, dan berkeadilan. Apakah hal tersebut dimungkinkan terwujud?

Ketimpangan relasi PRT dan majikan prinsipnya sudah mensejarah, karena keberadaan PRT tidak bisa dipisahkan dari peradaban, termasuk tatanan sosial yang hirarkis (pelapisan sosial), adanya kelas mampu (kaya) dan kelas tidak mampu (miskin). Pada



Ketimpangan relasi PRT dan majikan prinsipnya sudah mensejarah, karena keberadaan PRT tidak bisa dipisahkan dari peradaban, termasuk tatanan sosial yang hirarkis (pelapisan sosial), adanya kelas mampu (kaya) dan kelas tidak mampu (miskin).

masa kerajaan ataupun kesultanan, PRT umumnya berlatar kaum non-bangsawan, yang di wilayah tertentu disebut sebagai kaum budak. Dalam konteks ini, relasi yang terbangun

lebih berbasis pada obligasi sosial bahwa kelas bawah (budak) sudah seharusnya melayani kelas atas (bangsawan). Bahkan, dinarasikan sebagai wujud pengabdian atau kecintaan (altruistic) sekaligus juga penghargaan karena tidak semua kaum budak berkesempatan 'melayani' bangsawan. Kini, di era 'modern', relasi majikan (pemberi kerja) dengan PRT lebih bersifat transaksional, yang selayaknya bersifat legal-rasional, termasuk merekognisi, mengakui, dan memenuhi hak-hak PRT sebagai pekerja, bukan sekadar pembantu.

Dalam rangka itu, UU PPRT dirancang bukan hanya mempertegas status PRT sebagai pekerja, namun juga untuk melindungi PRT maupun majikan. Secara kelembagaan, penyelenggaraan perlindungan dan pengawasannya akan melibatkan RT/RW di level komunitas. Menariknya, pada pasal 27 (butir a), RT/RW juga diharapkan terlibat dalam memediasi ketegangan, bahkan konflik antara majikan dengan PRT. Pertanyaannya, secara kontekstual, kelembagaan RT/RW ini apakah ada dan berkiprah nyata? Selain itu, apakah siap, mampu, serta berdaya? Mengingat



pengalaman LabSocio UI dalam melakukan riset tentang PRT dan majikan, kondisi nyata menunjukkan bahwa peran dan kontribusi RT/RW masih lemah, bahkan mereka pun tidak memiliki data PRT di wilayahnya, padahal di perkotaan.

Dengan demikian, persoalan 'institutional and operational arrangement' di level komunitas masih perlu dielaborasi, karena implementasi UU ini bergantung pada kerja kerja infrastruktur sosial di tingkat lokal, mulai dari sosialisasi, pendataan, bahkan pemberi rekomendasi atas kelayakan majikan, selain pengawasan dan mediasi awal. Hal ini mengingat RUU ini berupaya mengintervensi ranah privat, tempat kerja PRT, yang pada dasarnya

merupakan area kekuasaan dan kewenangan majikan.

Sementara di sisi lain, para majikan juga dimungkinkan berposisi dominan di komunitasnya, termasuk dalam relasinya dengan pengurus RT/RW. Draf RUU belum mengidentifikasi infrastruktur sosial lainnya yang lebih berdaya, lebih netral, dan potensial dilibatkan pada tahap-tahap tertentu, apalagi RT/RW, pada dasarnya diposisikan sebagai perpanjangan negara (pemerintah). Lebih dari itu, rancangan yang ada belum mengidentifikasi dan membuka ruang keterlibatan serikat PRT, juga asosiasi majikan, bahkan asosiasi penyalur PRT, sebagai kelompok kepentingan.

Pada prinsipnya, pelibatan komunitas, sebaiknya tidak sebatas RT/RW. RUU PPRT perlu belajar dan berefleksi dari UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT (No.43 tahun 2004) dan implementasinya, yang mana pelibatan komunitas belum terlalu efektif, karena berhadapan dengan tantangan sosial kultural. Sebab itu, sistem rujukan yang terbangun lebih efektif dilekatkan kepada sistem layanan kesehatan (misalnya Pusat Krisis Terpadu), dan atau sistem perlindungan perempuan dan anak (misalnya Unit PPA di kepolisian (Polres) yang juga menangani tindak PPO (Pidana Perdagangan Orang).

Keberadaan RPA (Relawan Perempuan dan Anak), juga P2TP2A (Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), ataupun Ruang Bersama Merah Putih (di perdesaan), dapat diintegrasikan dalam upaya perlindungan dan pengawasan PRT, meski PRT tidak identik dengan perempuan dan anak. Justru adanya UU PPRT, dapat mendorong sinergi atau koproduksi layanan perlindungan perempuan dan anak, sehingga berbagai perundangan yang menyasar pada kaum rentan dan marginal, termasuk PRT (dewasa

maupun anak) dapat nyata dijalankan dan ditegakkan dengan baik, bermakna dan berdampak, serta berkeadilan.

Dalam rangka itu, sejumlah syarat diperlukan, yakni: (1) kesamaan pemahaman, misi dan visi antarstakeholders; (2) komitmen, termasuk payung kebijakan, ketersediaan sumberdaya dana maupun manusia (SDM) yang kompeten; (3) jejaring kelembagaan yang kuat, baik vertikal maupun horizontal; (4) terbangun sistem informasi, komunikasi, (dan dokumentasi) yang terpadu, akurat, terus ter-update, serta dapat diakses dengan mudah, khususnya oleh PRT sebagai pihak yang paling lemah dan rentan. Syarat ke-4 ini di era digital merupakan hal teknis, dan sangat dimungkinkan terbangun. Namun, secara filosofis adanya sistem tersebut merupakan wujud komitmen negara khususnya; (5) adanya sistem insentif, terutama kepada para pihak di level komunitas (termasuk RT/RW), sementara disinsentif ditujukan kepada penyelenggara negara maupun aparatnya yang tidak atau kurang responsif. Terpenuhinya berbagai persyaratan tersebut menjadi basis terbangunnya kepercayaan publik, termasuk rasa aman PRT maupun majikan.

Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa isu kelembagaan merupakan bagian yang melekat dalam melakukan intervensi struktural melalui perundang-undangan atau kebijakan publik lainnya. Namun demikian, secara substantif dan normatif, intervensi ini diharapkan bukan hanya mengubah paradigma (cara pandang), namun juga memperkuat komitmen para pihak (stakeholders), tidak hanya PRT dan pemberi kerja (Majikan). Artinya, UU ini diharapkan dapat menstimuli dan mendorong terjadinya transformasi sosial kultural, bukan hanya transformasi institusional dalam melindungi PRT. 🐾



Persoalan 'institutional and operational arrangement' di level komunitas masih perlu dielaborasi, karena implementasi UU ini bergantung pada kerja kerja infrastruktur sosial di tingkat lokal, mulai dari sosialisasi, pendataan, bahkan pemberi rekomendasi atas kelayakan majikan, selain pengawasan dan mediasi awal

Cek Kesehatan Gratis 2025 Menggapai Hingga Pelosok Negeri

Pemerintah pada tahun 2025, melalui Kementerian Kesehatan telah mencanangkan Program cek kesehatan gratis dengan alokasi anggaran mencapai sekitar Rp3,2 triliun dari APBN 2025.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Dana ini disiapkan untuk mendeteksi dini 14 jenis penyakit, termasuk kanker, guna meningkatkan kesadaran masyarakat pada pentingnya kesehatan preventif.

Salah satu tantangan krusial program ini adalah memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah,

terutama Puskesmas. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan, aksesibilitas program harus terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang masih kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.

"Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan haknya untuk diperiksa kesehatannya, karena kendala geografis atau informasi,"



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.

ujarnya, beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan keprihatinannya pada sejumlah fasilitas kesehatan yang dinilai belum ada kesiapan. "Puskesmas di perkotaan seperti Palu saja masih punya persoalan kesiapan. Apalagi yang di daerah terpencil? Ini PR besar," ungkapnya.

Nihayatul juga menyoroti kurangnya sosialisasi yang merata. "Sosialisasi lewat zoom series dari Kementerian Kesehatan itu belum sepenuhnya menjangkau semua pihak di daerah. Informasi tidak tersebar merata," katanya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mendesak pemerintah meningkatkan intensitas sosialisasi, terutama di luar Jawa. "Masih banyak masyarakat yang belum tahu program ini. Selain itu, sekitar 400 Puskesmas di Indonesia masih belum punya akses internet. Bagaimana mau terapkan aplikasi Satu Sehat?" katanya, beberapa waktu silam.



Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya.



Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi.



Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Maharani

Dari sisi pemerataan akses, Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi optimistis dengan Program Cek Kesehatan Gratis Pemerintah. "Program cek kesehatan gratis harus mudah diakses dan efektif. Dengan kolaborasi pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan, ini akan berdampak positif," ujarnya, Februari lampau.

Tak hanya itu, Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Nurhadi turut mendorong inovasi dalam pelaksanaannya. "Saya mendorong desa menjadi pion utama dalam pelaksanaan program skrining kesehatan gratis. Ini penting agar manfaatnya sampai ke pelosok, terutama daerah terpencil."

Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran di beberapa sektor, Komisi IX DPR RI memastikan bahwa program cek kesehatan gratis tetap menjadi prioritas. "Ini adalah

Masih banyak masyarakat yang belum tahu program ini. Selain itu, sekitar 400 Puskesmas di Indonesia masih belum punya akses internet

Asep Romy Romaya
Anggota Komisi IX DPR RI

langkah preventif yang penting bagi kesehatan masyarakat. Kami akan mengawasi ketat penggunaan anggarannya," tutur Anggota Komisi IX DPR RI Maharani, Maret silam.

Komisi IX DPR RI memiliki harapan besar terhadap program cek kesehatan gratis ini. Komisi IX berharap program ini tidak hanya menjadi inisiatif sesaat, tetapi dapat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh hingga pelosok daerah. Serta menekan jumlah penyakit dan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.

"Program pemeriksaan kesehatan gratis ini bukan hanya tentang kuantitas pemeriksaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa memastikan kualitas deteksi dini dan tindak lanjut bagi masyarakat. Kami akan terus memastikan program ini berjalan efektif dan merata ke seluruh pelosok negeri, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan," pandang Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari.  gal/mh

Optimisme Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen

Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Sidang Paripurna DPR, Mei lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.

faktor penting untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

"5,2 sampai 5,8 persen itu masih mempunyai harapan untuk bisa tercapai karena kita masih mendorong investasi dengan adanya Danantara dan adanya hilirisasi," terangnya.

Dalam sidang tersebut, pemerintah juga mengajukan sejumlah asumsi makro lainnya, antara lain inflasi di kisaran 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di level Rp16.500–Rp16.900, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 6,6–7,2 persen.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada di rentang USD 60–80 per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 600–605 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi pada kisaran 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto, menilai target pertumbuhan tersebut masih berada dalam batas realistis jika ditopang oleh program strategis nasional yang sedang berjalan. "Ke depan dengan angka 5,2 sampai 5,8, kita melihat angka pertumbuhan itu masih cukup realistis, karena banyak program-program yang masih berjalan sampai saat ini. Tentunya kita sampaikan tadi mengenai 8 program unggulan (pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). Salah satunya Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan," kata Wihadi dalam video di akun YouTube TVR Parlemen, Selasa (20/5/2025) lalu.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bahwa percepatan investasi dan program hilirisasi akan menjadi



Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto.



FOTO: FARHAN/VEL

Anggota Fraksi PKB Rifqy Abdul Halim.

“

Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah dalam rentang 5,2% hingga 5,8%. Target tersebut dinilai tidak sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto

Rifqy Abdul Halim
Anggota Komisi XI DPR RI

Wihadi turut mengingatkan bahwa ketidakpastian global, khususnya pada sektor perdagangan dan investasi, masih menjadi tantangan utama yang berpotensi

mengganggu rantai pasok dan meningkatkan biaya transaksi internasional. Untuk itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipatif.

Sedangkan Anggota Fraksi PKB Rifqy Abdul Halim, mengkritisi target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah dalam rentang 5,2% hingga 5,8%. Target tersebut dinilai tidak sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang hingga 8%.

Ia mengaku, justru lebih optimistis terhadap potensi pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut. “Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 lebih optimis sebesar 5,6% sampai 6% atau lebih tinggi dari proyeksi pemerintah,” ujar Rifqy dalam Rapat Paripurna DPR RI, Mei silam.

Rifqy menegaskan, target pertumbuhan 6% sangat memungkinkan bila pemerintah

mampu memperkuat ketahanan ekonomi domestik, termasuk mendorong konsumsi rumah tangga, memperbesar arus investasi padat modal dan padat karya, meningkatkan ekspor, serta mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

“Demikian juga dengan langkah strategis untuk memastikan bahwa hilirisasi dan transformasi digital serta ekonomi berjalan sesuai target dan rentang waktu yang ditetapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem memiliki pandangan berbeda. Anggotanya, Charles Meikyansyah, menyebut bahwa target pertumbuhan 5,2%–5,8% yang diajukan pemerintah merupakan angka yang realistis dan optimistis, namun membutuhkan strategi yang terarah dan kebijakan yang konsisten. “Capaian tersebut membutuhkan stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja,” kata Charles.

Charles juga menyoroti kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB yang tumbuh 4,98% secara tahunan pada 2024, masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Menurutnya, ini menandakan tekanan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, akibat peningkatan pekerjaan informal dan penurunan produktivitas sektoral.

Dalam konteks program makan bergizi gratis, NasDem berharap kebijakan ini bisa menciptakan efek pengganda (multiplier effect) seperti pembukaan lapangan kerja baru dan penguatan pasar lokal. “Kami mendorong agar kebijakan ini melibatkan pelaku usaha lokal, koperasi, UMKM, serta pemerintah daerah. Distribusinya juga harus berbasis sistem digital yang transparan dan akuntabel, dengan prioritas kepada daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi,” ujar Charles.  **tf/mh**

Menyusun Kembali Fondasi Pendidikan Nasional

Komisi X DPR RI berada di garda depan dalam mereformasi sistem pendidikan nasional. Melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), Komisi X sedang merumuskan regulasi pendidikan yang inklusif, komprehensif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.



Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, yang juga Ketua Panja RUU Sisdiknas, menegaskan, revisi UU No.20/2003 ini bukan hanya penyesuaian teknis, melainkan membangun fondasi pendidikan nasional baru yang relevan dengan Indonesia Emas 2045. "Pendidikan kita harus mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat, dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Harus ada

kepastian hukum, penyelarasan regulasi, dan penguatan kualitas serta akses pendidikan," ujar Hetifah beberapa waktu lalu.

Salah satu isu utama dalam revisi ini adalah harmonisasi berbagai undang-undang terkait pendidikan, seperti UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pesantren. Tujuannya menyatukan visi pendidikan dalam satu regulasi induk agar tidak terjadi tumpang

tindih implementasi di lapangan. "Kita perlu integrasi yang tidak mematikan kekhasan lembaga pendidikan tertentu, namun tetap dalam kerangka regulasi nasional yang seragam," tegas Hetifah.

Komisi X juga menekankan pentingnya memperkuat konsep link and match antara pendidikan dan dunia industri, serta mendorong digitalisasi sistem pembelajaran. Ini sejalan dengan tuntutan global dengan SDM yang berdaya saing tinggi. Peningkatan akses pendidikan menjadi titik tekan lain. Wacana wajib belajar 13 tahun, mulai dari PAUD hingga jenjang SMA, menjadi salah satu visi besar Komisi X dalam RUU ini. Hal ini sejalan dengan data bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia masih berada di angka 8,9 tahun.

Di sisi lain, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta, juga mendapat perhatian khusus. Hetifah mengusulkan skema subsidi penuh bagi sekolah swasta berbiaya rendah, sementara sekolah premium tetap diperbolehkan menarik biaya dengan pengawasan ketat. "Mandatory spending 20 persen APBN/APBD untuk pendidikan harus dioptimalkan. Realokasi anggaran dari program non-urgensial perlu dipertimbangkan," jelasnya.

Komisi X juga memperhatikan tantangan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani, menyoroti pentingnya sinkronisasi data wilayah 3T agar kebijakan tidak salah sasaran. Sementara itu, dalam forum RDPU bersama pemangku



Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani.



Anggota Komisi X, Denny Cagur.

kepentingan PAUD, muncul sejumlah rekomendasi penting, seperti perlunya sistem perizinan tunggal untuk PAUD multi-layanan, peningkatan kesejahteraan guru PAUD, dan penghapusan dikotomi PAUD formal dan nonformal.

"PAUD harus menjadi bagian integral dari pendidikan formal dengan dukungan tata kelola dan anggaran yang memadai," ujar Hetifah. Aspirasi mahasiswa juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Anggota Komisi X, Denny Cagur, menegaskan bahwa RUU ini harus menjawab kegelisahan publik, terutama terkait skema UKT dan keadilan pembiayaan pendidikan tinggi.

"RUU ini jangan hanya tambal sulam. Harus jadi landasan baru bagi arah kebijakan pendidikan kita," kata Denny dalam RDPU bersama perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Denny juga menyoroti pentingnya posisi guru dan dosen sebagai subjek aktif dalam sistem pendidikan. Peningkatan kualitas, perlindungan, serta kesejahteraan

tenaga pendidik menjadi salah satu prioritas utama.

Sementara itu, Anggota Komisi X Sabam Sinaga, menyambut baik putusan MK sebagai momentum memperbaiki sistem pembiayaan pendidikan. Ia menyoroti ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan di mana sebagian besar dana tersebar di kementerian non-teknis, dan bukan pada unit pelaksana pendidikan.

"Kita perlu pembenahan menyeluruh terhadap alokasi anggaran pendidikan, agar distribusinya benar-benar adil dan efektif," kata Sabam. Ia juga mempertanyakan urgensi keberadaan lembaga pendidikan tinggi di bawah kementerian non-pendidikan, yang dinilai berpotensi tumpang tindih dengan program di PTN dan PTS.

pun



Anggota Komisi X Sabam Sinaga.



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Li Qiang, di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2025). Foto: Kresno dan Farhan/Andri



Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal saat membuka acara High-Level FGD Koalisi Bersama Lawan Dengue (Ngobar Lawan Dengue), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025). Foto: Tonda/Andri



Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan, Kamis, (5/06/2025). Foto : Yoga/Andri



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Foto : Runi/Andri



Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita menerima audiensi pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Foto : Tari/Andri



Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera bertukar cinderamata usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Serbia untuk Indonesia Ivana Golubovic Duboka di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Foto : Wilga/Andri



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Italia untuk Indonesia di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (5/6/2025). Foto : Kresno/Andri



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh secara resmi menerima kunjungan Delegasi GKSB DPR Riâ€œPrancis dan Anggota Parlemen Prancis di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Foto : Devi/Andri



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memberikan sambutan dalam acara penyembelihan hewan kurban yang digelar pada Minggu (8/6/2025). Menyampaikan rasa syukur atas antusiasme pegawai dan para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Ia menyebutkan, tahun ini tercatat sebanyak 20 ekor sapi dikurbankan, naik dari jumlah tahun lalu hanya 13 ekor. Foto : Farhan/Andri



Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar secara resmi melantik 614 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Upacara Pelantikan PPPK Tahap I pada Kamis (5/6/2024) di Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Jakarta. Foto : Hans, Faisal/Andri



Herman Khaeron

Menjaga Arah Perjalanan Bangsa

Tidak semua orang bisa menyatu dengan arus zaman tanpa kehilangan prinsip. Herman Khaeron adalah pengecualian. Memang ia membiarkan semesta membawa dirinya dari seorang insinyur ke dunia politik, tapi setiap langkahnya selalu punya arah: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kecil tanpa listrik hingga ruang rapat kenegaraan, ia tetap memegang teguh cita-cita bangsa Indonesia.

Herman Khaeron lahir dan tumbuh di Garawangi, sebuah desa kecil di Kuningan, Jawa Barat. Masa kecilnya dihabiskan di tengah suasana yang nyaris tak tersentuh teknologi. Listrik belum masuk, apalagi telepon belum dikenal pada waktu itu. Ia belajar di bawah cahaya remang lampu minyak sebagai pelita.

"Saya mengalami betul hidup tanpa listrik. Main di sawah, main bola di lapangan tanah tanpa alas kaki, dan malam-malam gelap hanya diterangi lampu minyak tapi justru di sanalah saya belajar menikmati hidup apa adanya," kenang Herman membuka kisah hidupnya kepada Parlementaria.

Masa kecilnya, Herman selalu berada dilingkungan yang berubah dari waktu ke waktu, maklum





mengikuti penugasan ayahnya yang adalah seorang tentara. Baginya, berpindah-pindah tempat tinggal bukan masalah, malah ia jalani dengan penuh suka cita. Dari kampung ke barak militer, dari desa hingga ke kota, ia telahalui.

Satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya, selalu menjadi sosok anak yang aktif dimanapun dirinya berada. Saat berada di SD Negeri Garawangi I dan SMP Garawangi/SMPN IV Negeri Karawang, ia kerap dipilih menjadi pimpinan di kelasnya. Dirinya pun aktif terlibat dengan berbagai jenis organisasi seperti pramuka, osis, olahraga, hingga kesenian, bahkan kegiatan ekstrakurikuler memasak. Saat memasuki jenjang pendidikan menengah, Herman memilih sekolah di STM Negeri Karawang, disamping ia pun aktif mengikuti di berbagai organisasi pemuda.

Wajar, ia pun dikenal sebagai penggerak di wilayahnya. Kepemimpinan adalah hal alami yang tumbuh di dalam dirinya. Herman menegaskan "Saya senang berkawan, dan dimana pun saya berada, saya cepat punya teman dan saya suka mengorganisasikan kegiatan, dari mulai tujuh belas agustusan sampai

acara kesenian ketika di kampung," tuturnya.

Di jenjang perguruan tinggi, Herman memutuskan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Bandung jurusan Teknik dan Manajemen Industri. Selama menjalani pendidikan pun ia tetap aktif hingga menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Manajemen Industri serta bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dikenal dengan sapaan Kang Hero, ia memilih untuk lulus cepat diperguruan tinggi dan tentu harus berprestasi. Menurutny, hidup menuntut mobilitas dan ketahanan mental, inilah yang justru menjadikannya kekuatan untuk melalui kehidupannya.

Titik Balik

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1), Herman menjalani kehidupan di lingkungan kerja profesional, dimana sebagai lulusan teknik pada umumnya, ia melalang buana bekerja di sejumlah perusahaan besar, termasuk perusahaan Australia yang bergerak di bidang *water treatment* dan *waste water treatment*, setelahnya ia bekerja di British Petroleum (BP) Indonesia.

Dalam pekerjaannya, Herman selalu bersentuhan dengan masyarakat dan pengambil kebijakan. Ia sering turun ke lapangan mulai dari melakukan sosialisasi, menangani konflik sosial saat berkaitan dengan pekerjaannya, dan menjadi penghubung antara perusahaan dan masyarakat.

"Setiap kali ada pekerjaan, saya yang turun ke masyarakat. Di situ, saya belajar banyak tentang komunikasi publik, tentang keadilan sosial, dan bagaimana seharusnya pembangunan menyentuh rakyat," ucapnya.

Meski bekerja diperusahaan swasta, nalurnya sebagai aktivis dan organisatoris tak pernah padam. Ia tetap aktif di organisasi seperti Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Ikatan Alumni Teknik Industri Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, serta beberapa forum keinsinyuran. Seiring waktu berlalu, dirinya memutuskan melanjutkan studi magister di Institut Pertanian Bogor (IPB), mengambil jurusan Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Program ini dijalani di kelas khusus, kuliah yang khusus digelar pada akhir pekan, dan dalam perkuliahnya, Herman berada bersama tokoh-tokoh besar, salah satunya adalah Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Menko Polhukam dan menempuh pendidikan doktoral (S3), serta Mustafa Abubakar yang kala itu menjabat Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara, Adiyaksa Dault yang kemudian menjadi Menpora, Walikota Jakarta Selatan, dan lainnya. Bahkan dosennya Ani Ratnawati kemudian menjadi Dirjen Anggaran di era Presiden SBY.

"Kami kuliah bersama-sama di kampus IPB Baranangsiang, kadang makan siang bersama, meski beda

jurusan, ruang kelas, dan jadwal sering sama. Dari situlah hubungan personal terbangun,” ungkapny. Pak SBY menjadi panutan kami semua, selalu hadir tepat waktu, mengikuti kuliah penuh, dan serius dalam pembelajaran. Sama-sama menjalani perkuliahan dengan sungguh-sungguh. Ikatan personal mereka menjadi semakin kuat.

Ketika SBY mendirikan Partai Demokrat pada tahun 2001, meski Herman belum masuk pengurus Partai Demokrat karena masih bekerja di lingkungan yang melarang berpartai, namun memberikan dukungan penuh dengan membangun jaringan pendukung. Usai berkontemplasi, ia menyadari semangatnya sudah terpaut pada ide besar SBY yang menjadikan partai demokrat sebagai wadah perubahan sesuai amanah reformasi. Itu karena Partai Demokrat adalah anak kandung reformasi.

Baginya, tahun 2005 menjadi titik balik bertransformasi dari “pekerjaan” menjadi “pengabdian”. Ketika Kongres Partai Demokrat 2005 di Bali diselenggarakan, Herman hadir langsung dan bergabung dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai Ketua Departemen Kelautan dan Perikanan. Menerima amanah tersebut, ia pun memutuskan meninggalkan pekerjaannya untuk fokus dalam pengabdian di partai demokrat.

“Saya berhenti dari pekerjaan saya meski posisi dan penghasilan saya waktu itu cukup bagus, tapi saya merasa ini panggilan, saya ingin berkontribusi lebih luas,” ungkap Herman. Tidak sekadar bergabung, ia turut serta dalam Tim DPP PD yang menjahit perangkat peraturan organisasi partai dan membina jaringan daerah.

“Dulu, bendera kami beli sendiri, printer pinjam, operasional kantor biayai sendiri, tetapi kami punya semangat bahwa Partai Demokrat lahir dari rahim reformasi, memiliki

visi dan misi yang mulia, serta harus selalu siap menjawab harapan rakyat,” tegas Herman.

Tahun 2009, dirinya maju sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII yang meliputi Cirebon dan Indramayu. Kepercayaan ini dijanjinya tanpa ambisius, karena ia tidak menjadikan pencalonan ini sebagai obsesi pribadi. Menjalankan kampanye dengan pendekatan emosional, membuat masyarakat merasakan bahwa Herman sedang memperjuangkan aspirasi dengan jujur dan tulus.

Kerja Nyata

Sejak terpilih menjadi Anggota DPR RI pada tahun 2009, Herman langsung aktif dalam tugas-tugas parlemen. Ia tidak sekadar duduk di kursi DPR, tapi benar-benar bekerja dengan menghadirkan kebijakan yang berdampak luas. Selama empat periode berturut-turut menjadi anggota legislatif, ia dipercaya menangani berbagai komisi strategis, yaitu Komisi IV, Komisi VII, Komisi II, dan Komisi VI.

Hermanpun melanjutkan pendidikan doktoral (S3) ilmu pertanian di Universitas Padjadjaran. Selesai tepat waktu dan ia memperoleh predikat cumlaude, tentunya sambil menjalankan amanah rakyat sebagai anggota DPR RI secara sungguh-sungguh.

Selama menjadi pimpinan Komisi IV DPR, ia memperjuangkan ketahanan pangan dan perlindungan bagi petani dan nelayan Indonesia. Melalui kepemimpinannya sekaligus dukungan seluruh anggota dewan, Komisi IV DPR melahirkan sejumlah kebijakan krusial. Satu di antaranya Undang-Undang (UU) Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yang kini menjadi tonggak penting dalam sistem pangan nasional. Di dalamnya, papar Herman, ditegaskan bahwa pangan adalah hak asasi manusia, yang harus tersedia dengan cukup, terjangkau, dan bergizi seimbang.



Tidak hanya itu saja, kebijakan tersebut memberikan efek domino seperti pelabelan makanan wajib dalam bahasa Indonesia, larangan penimbunan pangan, dan lahirnya Badan Pangan Nasional, yang kini menjadi pilar pengendalian harga dan distribusi pangan nasional. Lalu, ada sejumlah regulasi yang diterbitkan pada masa kepemimpinannya, diantaranya UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, UU Hortikultura, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Semua regulasi ini punya satu benang biru, yaitu membela kepentingan masyarakat kecil di sektor pangan dan sumber daya alam,” terang Herman. Pada tahun 2017, ia berpindah ke Komisi VII DPR. Pada saat itu, Indonesia menghadapi krisis energi primer karena harga batu bara melambung tinggi dan mengancam PLN berpotensi bangkrut. Tidak ingin larut dalam krisis, dirinya turut mengusulkan

sekaligus mendorong kebijakan *Domestic Market Obligation (DMO)* dan *Domestic Price Obligation (DPO)* untuk segera diberlakukan.

Adanya dua kebijakan tersebut, maka DMO mewajibkan perusahaan tambang menjual sebagian batu bara mereka untuk pasar dalam negeri, khususnya PLN. Sementara DPO menetapkan harga patokan pembelian pemerintah. "Kalau tidak, PLN mengalami kerugian yang sangat besar, dan bangkrut. Saya yang memimpin rapat penetapan kebijakan itu di rapat RDPD dengan PLN dan Raker dengan menteri," kenangnya.

Walaupun keputusan ini sempat ditentang oleh pelaku industri tambang, namun ia tetap berdiri tegak. Menurutnya, kepentingan rakyat dan negara lebih penting daripada keuntungan sesaat. Selanjutnya, pada tahun 2018, Herman ditugaskan partai pindah Komisi II DPR. Selama berada di komisi ini, dirinya memperoleh amanah untuk menjabat sebagai pimpinan Komisi II dan langsung memegang Ketua Panitia Kerja Revisi UU Pertanahan, yang mana sejak tahun 1960 belum pernah diperbarui. Oleh sebab itu, ia dan anggota komisi II membawa gagasan seperti bank tanah, sertifikat rumah susun, dan penguatan hak atas tanah bagi masyarakat adat dan masyarakat kecil.

Meskipun revisi undang-undang ini belum tuntas pada masanya, karena dinamika politik nasional, banyak ide yang ia usulkan diadopsi ke dalam UU Cipta Kerja. Menurutnya, semangatnya tetap sama, yakni melindungi hak rakyat atas tanah, bukan hanya memberi ruang untuk kepentingan investor besar.

Periode selanjutnya 2019, Herman terpilih kembali dan dipercaya duduk di komisi VI, sebuah komisi yang membidangi BUMN, koperasi, UMKM, dan investasi. Sejumlah kiprah utamanya antara lain menginisiasi

penyelesaian kasus Jiwasraya, yang kini perusahaan tersebut telah direstrukturisasi menjadi IFG Life; turut membela Garuda Indonesia Airways saat menghadapi krisis, sehingga perusahaan penerbangan plat merah tersebut berhasil diselamatkan oleh adanya suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Tidak hanya itu, dirinya turut mengawal kasus Asabri dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang ia terlibat aktif dalam pengawasan, pemulihan aset, dan perlindungan publik. Secara konsisten, ia mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan UMKM secara konkret di tengah situasi ekonomi sulit.

Pemilu tahun 2024 terpilih kembali, dan saat ini sebagai Anggota Komisi VI, juga merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang bertugas mengawasi keuangan negara dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Ia juga kini ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, dan memimpin berbagai organisasi diantaranya Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Ketua Umum Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), Ketua Umum Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), dan Presidium Majelis Nasional KAHMI.

Walaupun DPR kerap diterpa krisis dan kerap disorot tajam oleh publik, dirinya tetap menjalankan perannya sebagai wakil rakyat di DPR. Sebab, baginya, setiap pekerjaan DPR memengaruhi sendi kehidupan rakyat mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, lalu lintas, dan lain-lain diatur melalui undang-undang.

Pun, dalam pembahasan undang-undang tersebut disusun dan dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Apalagi, terangnya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang melekat dalam fungsi tugas DPR sangat menentukan nasib bangsa

dan negara.

"Kalau ada orang bilang kerja DPR enggak kelihatan, sebenarnya mereka enggak paham saja. Bahkan, harga daging ayam dan beras di pasar bisa dipengaruhi oleh keputusan politik karena diperjuangkan sesuai aspirasi dan harapan rakyat baik dalam masa sidang maupun masa reses," ucap Herman.

Sebagai politisi senior, ia tidak menganggap dirinya lebih tahu atau paling benar. Dia justru menempatkan diri sebagai jembatan, mendorong generasi muda untuk masuk dan belajar, sambil tetap menghormati nilai-nilai dasar dalam berpolitik, yakni tanggung jawab, etika, dan keteguhan pada konstitusi.

"Kalau anak muda yang idealis menjauh dari politik, maka ruang itu akan diisi orang-orang yang tidak punya kepentingan pada rakyat. Politik itu harus diisi oleh orang-orang baik. Saya belajar dari banyak tokoh. Anak muda juga perlu belajar tapi kami yang senior juga harus belajar dari mereka yang berpengalaman karena pada setiap zaman tantangan berbeda," kilahnya.

Tetap Membumi

Di tengah tumpukan agenda yang tiada henti menerpa, Herman masih menyempatkan diri untuk menikmati hal-hal kecil yang menyenangkan. Ia tetap ingin menjadi pribadi sederhana yang tidak pernah kehilangan selera hidupnya.

"Ayam kampung dan tempe goreng adalah makanan favorit saya sejak kecil. Sederhana, tapi bikin bahagia, itu enggak pernah saya tinggalkan dalam prinsip hidup saya," katanya sambil tertawa.

Mungkin, di situlah rahasianya bertahan di tengah dinamika politik yang sering keras dan penuh tekanan. Herman selalu menjaga keseimbangannya dengan hal-hal yang membumi, seperti air yang mengalir: tenang, tapi menghidupi semua yang dilewatinya.  um/mh

Mengamankan Kedaulatan di Selat Malaka

Kodam II/Sriwijaya memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan negara di Selat Malaka. Selat ini merupakan lalulintas dagang internasional yang bersentuhan langsung dengan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai garda terdepan di wilayah ini, Kodam II/Sriwijaya harus memperkuat daya tangkal menghadapi

kemungkinan gangguan keamanan dan kedaulatan negara.

Saat berkunjung ke Markas Kodam II/Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, delegasi Komisi

I DPR RI mengemukakan persoalan ini untuk melihat dari dekat kesiapan operasional untuk memperkuat daya tangkal di wilayah Sumatera. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menyampaikan,

"Kunjungan ini merupakan implementasi dari Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, di mana Komisi I DPR memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.

“

Kodam II/Sriwijaya memegang peran vital sebagai pilar pertahanan nasional di kawasan Sumatera

Ahmad Heryawan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang.

Hal ini sangat relevan dan mendesak mengingat posisi strategis Sumatera dalam konstelasi geopolitik regional serta perannya sebagai penyangga pembangunan nasional," ujar Heryawan saat memimpin pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025) lalu.

Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, menjelaskan, Kodam II/Sriwijaya memegang peran vital sebagai pilar pertahanan nasional di kawasan Sumatera. Wilayah tanggung jawabnya meliputi empat provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung—daerah dengan karakteristik geografis unik, garis pantai panjang, kekayaan sumber daya alam, serta dinamika keamanan yang kompleks.

"Pulau Sumatera memiliki posisi sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan menjadi pintu gerbang utama Indonesia. Dengan luas lebih dari 470 ribu kilometer persegi dan populasi lebih dari 58 juta jiwa, wilayah ini memerlukan pengamanan optimal terhadap infrastruktur vital dan kawasan industri strategis guna mendukung pembangunan berkelanjutan," jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyoroti pentingnya pengamanan terhadap infrastruktur vital dan kawasan industri strategis, mengingat kontribusi besar Sumatera dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. "Kami ingin memastikan Kodam II/Sriwijaya memiliki kesiapsiagaan operasional yang memadai dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah Sumatera," tegas legislator Dapil Jawa Barat II tersebut.

Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, Komisi I DPR membincang soal praktik tambang emas ilegal yang telah merugikan



Anggota Komisi I, Slamet Ariyadi, saat kunjungan kerja Komisi I ke Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/5/2025).

“

Koordinasi lintas lembaga harus diperkuat untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh.

Slamet Ariyadi
Anggota Komisi I DPR RI

keuangan negara. Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi mengemukakan hal ini saat mengikuti pertemuan Komisi I dengan Badan Intelijen Daerah (BINDA), TNI, dan Polda setempat. Ia mengatakan, masyarakat setempat harus diedukasi soal ini, karena selain merugikan ekonomi negara, juga merusak lingkungan.

"Kami tadi juga menanyakan baik di Kodam maupun di BINDA mengenai tambang emas ilegal. Hal

ini tentu untuk mencegah kerugian negara, karena kerugiannya cukup fantastis, mencapai triliunan. Kita bisa kehilangan cadangan emas dan perak," jelas Slamet di Pontianak, Kalbar, Rabu (28/5/2025) lalu.

Ia menekankan koordinasi lintas lembaga harus diperkuat untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi penindakan, tetapi juga dari sisi pencegahan melalui pendekatan kepada masyarakat. "Oleh karena itu, perlu koordinasi dari BIN, TNI, dan kepolisian agar bisa melakukan pencegahan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik penambangan emas ilegal itu tidak diizinkan," tegasnya.

Komisi I berharap, langkah-langkah strategis lintas lembaga dapat segera diwujudkan untuk menjaga sumber daya alam nasional sekaligus memastikan stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat. — **afr,est/mh**

Komisi II Soroti Tata Ruang, Lahan Terlantar, dan BUMD

Komisi II DPR RI menyoroti permasalahan serius terkait tata ruang dan pemanfaatan lahan di berbagai daerah, serta mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Temuan ini terungkap dalam serangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Komisi II ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepulauan Riau (Kepri), dan Bali.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam kunjungan kerjanya ke NTB, mengungkapkan keprihatinan atas banyaknya lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dibiarkan terbengkalai. Menurut Rifqi, tingginya biaya investasi atau konflik dengan masyarakat setempat menjadi pemicu tidak optimalnya pemanfaatan lahan tersebut. Akhirnya, fakta ini menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif.

"Banyak HGU dan HGB sudah diterbitkan, namun tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak. Ini disebabkan oleh tingginya biaya investasi atau konflik dengan masyarakat setempat, yang membuat iklim usaha tidak kondusif," ujar Rifqi kepada Parlemenaria di Lombok, NTB, Rabu (28/5/2025) silam.

Kasus paling mencolok terjadi di Gili Trawangan, destinasi pariwisata unggulan NTB. Banyak hotel dan restoran yang telah memiliki hak sah sejak tahun 1980-an. Namun,

secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 2021. Hal ini, menurut Rifqi, mengancam investasi dan ketertiban administrasi pertanahan, serta merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, karena status hukum yang tidak jelas.

Komisi II DPR RI berencana menindaklanjuti persoalan Gili Trawangan dengan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Pemerintah Provinsi NTB, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Menteri KLHK. Selain isu pertanahan, Komisi II juga secara aktif mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mendorong pendapatan daerah.

Di Kepulauan Riau, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas menekankan pentingnya penguatan peran BUMD. Ia menyatakan bahwa pengembangan BUMD harus diarahkan pada sektor usaha yang mampu menekan biaya operasional, namun tetap menghasilkan profit, sehingga berkontribusi nyata



Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (X), saat melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (28/5/2025).

FOTO: BALGGYS/VEL

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"BUMD harus fokus pada bisnis-bisnis yang bisa menekan biaya-biaya operasional, agar mereka bisa menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap APBD," kata Giri kepada Parleментарia di Gedung Graha Kepri, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (28/5/2025) lalu.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, terdapat 1.057 BUMD aktif di Indonesia dengan total aset mencapai Rp1.170,1 triliun.

BUMD diharapkan mampu menyeimbangkan kekuatan pasar, mendukung pengembangan UMKM, serta menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan. "Harapannya, nanti dengan meningkatnya status di Kementerian Dalam Negeri dari Kasubdit menjadi Direktur Jenderal, pengawsan terhadap BUMD dan pembinaan terhadap BUMD seluruh Indonesia bisa lebih optimal. Sehingga, BUMD bisa menjadi



Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas (X) saat memimpin pertemuan dalam Kunker Reses Komisi II di Gedung Graha Kepri, Batam, Kepulauan Riau, hari Rabu(28/05/2025).

salah satu penyumbang ke APBD," tutupnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, saat kunjungan kerja reses di Denpasar,

Bali, menegaskan, pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia berharap pembangunan infrastruktur yang masif selama satu dekade terakhir dapat menjadi peluang untuk mengelola aset daerah secara lebih produktif, terutama di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, dan pengelolaan sumber daya mineral.

Aria menyoroti kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola BUMD yang sangat krusial. Pengelolaan yang profesional dan jalinan kerja sama dengan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri, akan meningkatkan potensi pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat.

"Di situlah sebenarnya Direktorat BUMD dan BLUD itu membuat suatu pembinaan-pembinaan supaya pengelolaan BUMD ini tidak justru sebaliknya menjadi beban keuangan daerah yang selalu ada permodalan daerah yang ditempatkan dan selalu saja tidak pernah untung," ungkapnya. [gal,mun,gys/mh](#)



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi II ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).



FOTO: PRIMA/VEL

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yulianti saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bengkulu, Rabu (28/5/2025).

Penegakan Hukum Tanpa Intervensi

Komisi III DPR RI menyoroti berbagai tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, mulai dari independensi lembaga hukum hingga pemberantasan premanisme dan peredaran narkoba.

Dalam kunjungan kerja reses ke Bengkulu, Padang (Sumatera Barat), dan Ambon (Maluku) Komisi III menekankan pentingnya reformasi menyeluruh untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berintegritas.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yulianti, dalam kunjungannya ke Bengkulu, menegaskan bahwa integritas dan independensi lembaga hukum adalah harga mati untuk membangun kepercayaan publik. Dalam pertemuan dengan Kapolda, Kajati, dan Kepala BNNP Bengkulu, Sari mengungkapkan

kekhawatirannya atas maraknya kejahatan yang merugikan rakyat, seperti mafia tanah, peredaran narkoba, dan korupsi di level daerah.

"Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apa pun. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan," tegas Sari saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bengkulu, Rabu (28/5/2025) lalu. Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus menjadi alat pemberdayaan, bukan penindasan, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Reformasi struktural dan transformasi digital lembaga hukum menjadi sebuah keniscayaan.

Berantas Premanisme

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta, dalam kunjungan kerjanya ke Padang, Sumatera Barat, menyoroti persoalan premanisme yang masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sudirta menegaskan bahwa



FOTO: YASMIN/VEL

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, saat kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, Rabu (28/5/2025).

penindakan terhadap premanisme harus menyasar gembong besar atau "bos-bos" di balik aksi-aksi kriminal jalanan, bukan hanya pelaku kecil-kecilan di lapangan.

"Nggak ada gunanya menangkap yang kecil-kecil kalau yang besar nggak ditangkap. Ibarat pohon ilalang, kalau hanya dipotong daunnya tapi akarnya dibiarkan, begitu musim hujan, tumbuh lagi. Akarnya itu yang harus dicabut," tegasnya usai kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, Rabu (28/5/2025) lalu.

Ia juga menyinggung soal peran organisasi masyarakat (ormas) yang kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum preman sebagai tameng. Ia meminta agar satgas penanganan premanisme yang dibentuk pemerintah mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberadaan premanisme yang tidak ditindak serius dapat berdampak besar terhadap ekonomi nasional, membuat investor lari, dan memicu pengangguran serta ketegangan sosial.

"Kalau preman dibiarkan, investor lari. Investor lari, tenaga kerja nganggur. Kalau nganggur, bisa timbul kerusuhan. Masa kita mau negara ini mengalami kerusuhan karena preman?" tutupnya.

Perkuat BNN

Di Ambon, Maluku, Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyoroti minimnya alokasi anggaran dan fasilitas yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku. Soedeson menegaskan pentingnya peningkatan anggaran dan dukungan sumber daya bagi BNN, khususnya di wilayah perbatasan seperti Maluku yang sangat rawan peredaran narkoba dan penyelundupan ilegal.

"Kami terus terang akan mendorong di bidang anggaran, khususnya di BNN secara nasional itu sekitar Rp2,4 triliun. Maluku hanya sekitar Rp7 atau 9 miliar. Itu menurut saya sangat kurang," ujar Soedeson di Ambon, Maluku, Rabu (28/5/2025) lalu.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini, di Provinsi Maluku hanya terdapat dua kantor BNN. Padahal, wilayah tersebut memiliki tantangan geografis yang kompleks dan berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste, dan Filipina.

Anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini menyatakan, pihaknya akan mendorong agar anggaran untuk BNN dapat ditingkatkan secara signifikan. Penambahan tenaga kerja dan pembangunan fasilitas rehabilitasi sebagai langkah penanganan yang lebih manusiawi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba dan menjaga keamanan wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di kawasan timur.

Komisi III DPR RI berkomitmen memperjuangkan kebutuhan lembaga penegak hukum di daerah, baik dalam legislasi, anggaran, maupun koordinasi lintas sektor, demi menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan berintegritas.

ysm,qq,pdt/pdt



FOTO: KIKI/VEL

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (28/05/2025).

Memusnahkan Pakan Mengandung Ganja

Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Badan Karantina Nasional (Barantin), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai yang memusnahkan pakan burung mengandung biji ganja. Ini langkah penting dalam menyelamatkan satwa peliharaan sekaligus mengamankan penyalahgunaan narkoba.



Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama tim meninjau langsung proses pemusnahan pakan burung mengandung biji ganja di Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBUTKHIT) Bekasi, Senin (19/5).

Hal ini terungkap ketika Komisi IV DPR saat berkunjung ke Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBUTKHIT) di Kabupaten Bekasi, Senin (19/5) lalu. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengapresiasi langkah pemusnahan barang ilegal ini

yang mencapai 983,5 kg. Ia menilai, pemusnahan ini merupakan respon konkret untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman narkoba.

"Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, agar hal-hal yang dapat merusak generasi muda tidak dengan mudah masuk ke Indonesia," katanya. Titi, begitu ia akrab disapa,

menambahkan, tugas yang diemban Barantin dan BNN tidaklah ringan. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pemberantasan penyelundupan yang berpotensi merusak generasi bangsa.

"Tolong kalau mendengar ada penyelundupan seperti ini, sampaikan kepada BNN atau Barantin. Kami di Komisi IV DPR RI juga menyadari

bahwa tugas Barantin cukup berat, apalagi dengan anggaran yang sangat minim,” kilah Titi.

Pihaknya mengaku, akan memperjuangkan penambahan anggaran Barantin agar pengawasan terhadap lalu lintas komoditas pertanian dan peternakan bisa berjalan lebih optimal. “Kami akan berusaha untuk memperjuangkan peningkatan anggaran Barantin ke depan,” pungkas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Penyerapan Gabah

Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, delegasi Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan pertanian di Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (19/05/2025) lalu. Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi kelompok petani terkait penyerapan gabah dan jagung sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang telah diterbitkan awal tahun ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI, khususnya untuk melihat langsung implementasi kebijakan pemerintah di lapangan. “Ini adalah kunjungan kerja Panja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Ibu Ketua Komisi IV,” ujar Alex.

Ia menegaskan bahwa substansi utama dari kunjungan ini adalah menyerap langsung keluhan dan aspirasi para petani, baik petani padi maupun jagung. “Kita ingin mendengar langsung bagaimana pelaksanaan Inpres yang menetapkan harga gabah di angka Rp6.000 per kg dan harga jagung Rp5.500 per kg. Kami bersyukur, di tingkat petani, kebijakan ini diapresiasi. Tapi, tentu saja masih banyak catatan yang harus ditindaklanjuti,” jelasnya.

Menurut Alex, masukan dari para petani sangat diperlukan untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan penyerapan hasil panen, terutama oleh instansi

pelaksana seperti Perum Bulog. “Panja dibentuk untuk menyerap semua keluhan, sekaligus menyusun rekomendasi guna memperbaiki mekanisme yang digunakan Bulog dalam melaksanakan penugasan dari Presiden,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan distribusi informasi dan pelaksanaan kebijakan di lapangan, Alex mengungkapkan bahwa proses masih berjalan secara bertahap. “Inpres ini baru diterbitkan pertama kali pada bulan Januari, dan kemudian dimutakhirkan pada bulan April. Jadi memang ini masih dalam tahap awal implementasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, peran Panja sangat krusial untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan—termasuk Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional—dapat duduk bersama dan merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif.

“Tujuannya jelas, agar Inpres ini bisa dilaksanakan sebaik mungkin dan betul-betul berpihak kepada petani,” tutup politisi PDI Perjuangan tersebut. — **dip/mh**



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, saat kunjungan kerja Panja Penyerapan Gabah dan Jagung di Situ Gunung, Sukabumi, Senin (19/05/2025).

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Jawa Tengah dan Yogyakarta

Komisi V DPR RI menunjukkan komitmennya mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur nasional melalui serangkaian Kunjungan Kerja Spesifik ke beberapa daerah strategis di Pulau Jawa, khususnya Kabupaten Sleman (DIY), Kota Semarang (Jateng), dan Kabupaten Tulungagung (Jatim).

Fokus kunjungan meliputi peninjauan pembangunan jalan tol, infrastruktur jalan dan irigasi, serta evaluasi kesiapan pelabuhan ekspor. Dalam kunjungan ke Kabupaten Sleman, Komisi V yang dipimpin Wakil Ketua Roberth Rouw meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 1. Menurut Roberth, proyek ini memiliki arti strategis, karena akan memangkas waktu tempuh dari Yogyakarta ke Semarang dari tiga jam menjadi hanya satu jam, sekaligus menghubungkan ke jaringan Tol Trans Jawa.

"Tol ini menjadi alternatif signifikan bagi mobilitas masyarakat dan logistik. Selain itu, juga mendukung pengembangan kawasan segitiga emas Jogja–Solo–Semarang (Joglosemar) dan akses ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas Candi Borobudur," ujar Rouw di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (23/5/2025) lalu.

Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan, seperti



Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (23/5/2025).

jalur yang melintasi kawasan cagar budaya dan tanah milik Kesultanan Yogyakarta. Rouw menekankan perlu pendekatan yang mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan budaya.

"Tol ini dibangun di atas tanah-tanah yang tidak boleh dirusak,

bahkan sebagian jembatan dibangun di atas sungai dan lahan konservasi. Kami memahami tantangan tersebut dan mendorong agar proses konstruksi tetap memperhatikan prinsip pelestarian dan tidak merusak lingkungan sekitar," katanya.

Diketahui, hingga Februari 2025, progres pembebasan lahan mencapai 96,08 persen dan konstruksi 75,9 persen. Seksi 1 ditargetkan selesai pada kuartal II tahun 2026. Komisi V juga mendorong agar rest area dimanfaatkan sebagai wadah pertumbuhan UMKM lokal dan mengingatkan pentingnya pembayaran tepat waktu kepada subkontraktor.

Pemeliharaan Infrastruktur Daerah

Di Tulungagung, Anggota Komisi V Hanan A Rozak mengingatkan pemerintah daerah pada pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun. Tanpa pemeliharaan yang baik, pembangunan akan sia-sia.

"Pemerintah pusat membangun, tapi pemeliharaan harus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kalau drainase di depan rumah mampet, lalu genangan air dibiarkan, ya jalan akan cepat rusak," ujar Hanan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (23/5/2025) silam.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini memahami kondisi keuangan di daerah sangat terbatas, sehingga perlu dukungan anggaran dari pusat melalui skema Inpres Jalan Daerah



Anggota Komisi V DPR RI Hanan A Rozak saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (23/5/2025).

untuk memastikan daerah-daerah potensial seperti Tulungagung, baik dari sisi pertanian maupun pariwisata, bisa berkembang secara optimal.

"Iya saya kira ini perlu mendapat

perhatian secara khusus, ya termasuk daerah-daerah lain yang berpotensi seperti Tulungagung dari sisi pertanian dan pariwisata. Ini kalau bisa dibangun infrastrukturnya sangat luar biasa. DPR bukan eksekutornya, tapi nanti kita fasilitasi dengan Kementerian PU bagaimana bisa memberikan perhatian secara khusus. Sampaikan usulan-usulan, baik perbaikan jalan, pemeliharaan, maupun pembangunan, begitu juga dengan irigasi," pungkas legislator asal Dapil Lampung II ini.

Pemerataan Infrastruktur Jateng

Sementara itu, di Kota Semarang, Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arief Wibowo menilai, pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah masih belum merata, khususnya antara wilayah utara dan selatan.

"Dengan jumlah penduduk yang padat, Jawa Tengah memiliki potensi besar. Namun, infrastruktur yang

belum memadai justru menghambat optimalisasi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi," ujar Yanuar kepada Parlementaria usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang, Jumat, (23/05/2025) lalu.

Komisi V juga meninjau Pelabuhan Tanjung Mas, yang menurut Yanuar berperan penting sebagai sarana ekspor dari wilayah Banyumas dan Cilacap. Ia menekankan revitalisasi pelabuhan guna meningkatkan daya saing daerah dan memperlancar distribusi logistik.

"Revitalisasi pelabuhan menjadi hal penting untuk menunjang perdagangan dan meningkatkan daya saing daerah," imbuhnya. Yanuar menegaskan, pihaknya akan mendorong kementerian teknis, seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, agar memperhatikan secara khusus pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. [pun,oji,hnm/mh](#)



Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arief Wibowo, saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Gubernur Jawa Tengah serta jajaran Pemerintah Provinsi dan Daerah Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat, (23/05/2025).

Pabrik Pupuk di Kaltim untuk Jawab Kebutuhan Pupuk

Pembangunan pabrik pupuk di Kalimantan Timur (Kaltim) membawa visi memperkuat ketahanan pangan. Pembangunan pabrik ini juga sekaligus untuk menjawab kebutuhan pupuk nasional.

Aspirasi Gubernur Kaltim dan Anggota Komisi VI sendiri, Syarifah teralisasi setelah keduanya mengusulkan pembangunan pabrik ini kepada Komisi VI DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan pabrik pupuk di Kalimantan Timur. "Kunjungan kerja ini

merupakan tindak lanjut atas aspirasi dari Gubernur Kalimantan Timur dan Ibu Syarifah, Anggota Komisi VI DPR dari dapil Kaltim," ungkap Andre di Samarinda, Kaltim, Rabu (18/6/2025) lalu.

Komisi VI turut mengundang sejumlah BUMN, termasuk Pupuk Indonesia dan entitas BUMN regional di Kalimantan, guna memastikan kapasitas produksi pupuk di daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan lokal. "Kami ingin memastikan

“

Pembangunan ini akan menjadi kontribusi penting BUMN dalam mendukung agenda swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Andre Rosiade
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kota Samarinda, Rabu (18/6/2025).

FOTO: EK/VEL



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Samarinda, Rabu (18/6/2025).

produksi pupuk di Kalimantan Timur benar-benar bisa menjawab kebutuhan pupuk untuk wilayah ini," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Andre menyebut bahwa proyek pembangunan pabrik pupuk baru menjadi bagian dari program pemerintah yang akan diimplementasikan melalui BUMN. Menurutnya, Direktur Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia telah menyampaikan bahwa sejumlah proyek tengah berjalan, termasuk rencana pembangunan pabrik baru di Bontang, Kaltim.

Pembangunan ini akan menjadi kontribusi penting BUMN dalam mendukung agenda swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto. Terkait perubahan struktur manajemen di Pupuk Indonesia, Andre juga menyampaikan harapan agar perubahan direksi membawa dampak positif terhadap kinerja perusahaan.

“

Komisi VI siap mendukung secara politik maupun anggaran agar persoalan ini bisa segera dituntaskan. “Kami akan membantu dalam hal anggaran dan pengawasan.

Eko Hendro Purnomo
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

“Kemarin baru saja digelar RUPS. Harapan kami, dengan pergantian direksi baru—di mana direktur

utamanya tetap—Pupuk Indonesia bisa terus berbenah dan makin responsif dalam menjawab tantangan pupuk nasional,” tutupnya.

Akses Listrik dan Telekomunikasi

Masih di Kaltim, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menyerukan pentingnya pemerataan akses listrik dan jaringan telekomunikasi di Kaltim. Eko menyampaikan, keprihatinan atas masih banyaknya desa yang belum terjangkau layanan dasar dari dua BUMN, seperti PLN dan Telkom.

“Alhamdulillah, hari ini kami dari Komisi VI DPR sedang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Kenapa kami memilih Kaltim? Karena kami melihat ada 10 kota dan kabupaten di provinsi ini yang erat kaitannya dengan keberadaan BUMN,” ujar Eko di Samarinda, Kaltim, Rabu (18/6/2025) silam. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat 109 desa di Kaltim yang belum mendapatkan akses listrik PLN. Selain itu, titik blank spot sinyal juga menjadi persoalan serius.

Dalam kesempatan itu, Komisi VI pun mengundang sejumlah BUMN terkait, seperti PLN dan Telkom, untuk hadir langsung dan memberikan respons cepat terhadap persoalan tersebut. “Kami ingin agar desa-desa di Kalimantan Timur ini bisa segera ter-cover listrik dan sinyal. Karena kami tidak ingin Kalimantan Timur tertinggal, apalagi di satu sisi kita punya IKN di sini, tapi di sisi lain masih banyak daerah yang tertinggal. Ini ironis,” tegasnya.

Eko menambahkan, Komisi VI siap mendukung secara politik maupun anggaran agar persoalan ini bisa segera dituntaskan. “Kami akan membantu dalam hal anggaran dan pengawasan. Kalau memang ada kebutuhan anggaran untuk percepatan akses, kami siap mendukung,” pungkas politisi Fraksi PAN ini.  eki/mh



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Ambon, Rabu (5/6/2025).

Memperkuat Pariwisata Maluku

Komisi VII DPR RI berkomitmen menguatkan sektor pariwisata di provinsi Maluku dengan mengembangkan ekonomi kreatif dan budaya. Maluku memiliki sumber daya budaya, kuliner, dan ekonomi kreatif yang luar biasa. Saatnya menggarap potensi ini untuk pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Ambon, Maluku, Rabu (5/6/2025) silam, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyebut, Maluku memiliki kekayaan

sumber daya budaya, kuliner, serta potensi kreatif yang luar biasa yang belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Jika dikelola secara serius, menurutnya, sektor ini mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Soft power berbasis budaya dan ekonomi kreatif harus menjadi ujung tombak penguatan pariwisata Maluku. Banyak wisatawan mancanegara datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga mencari pengalaman budaya, kuliner, serta produk kreatif khas daerah. Maluku memiliki semua potensi itu," ujarnya kepada Parlemen usai memimpin pertemuan.

Maluku perlu memperkuat identitas kuliner dan produk kreatifnya

“

Maluku memiliki kekayaan sumber daya budaya, kuliner, serta potensi kreatif yang luar biasa

Lamhot Sinaga
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

agar mudah dikenali oleh wisatawan. Selama ini, wisatawan mancanegara belum memiliki referensi kuat terkait kuliner atau produk khas Maluku, sehingga potensi pemasukan daerah dari sektor ini belum tergarap maksimal. "Kalau kita ke Jepang, kita sudah tahu mau makan apa, belanja apa, membawa oleh-oleh apa. Maluku sebenarnya punya kekayaan kuliner tradisional yang sangat khas, namun perlu dorongan kuat agar menjadi bagian dari daya tarik utama pariwisata," jelasnya.

Untuk itu, ia menyerukan, ada kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Maluku secara terpadu. "Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari kerajinan tangan, seni pertunjukan, hingga pengembangan produk olahan hasil laut sebagai kuliner khas Maluku," ungkap Lamhot.

Lebih jauh, Komisi VII DPR RI juga mengingatkan pentingnya perubahan paradigma pembangunan yang selama ini cenderung Jawa-sentris menuju pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Maluku. Ia mengungkapkan, Maluku memiliki posisi strategis



Masih ada tantangan yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif, seperti akses distribusi, pasar, hak cipta, dan promosi karya.

Rahayu Saraswati
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

dalam pengembangan maritim, pariwisata, hingga industri pengolahan hasil laut yang berorientasi ekspor.

"Kita mendorong agar hilirisasi perikanan tidak hanya berhenti di Pulau Jawa, tapi juga tumbuh di daerah penghasil seperti Maluku. Dengan begitu, nilai tambah dari hasil laut bisa dinikmati langsung oleh masyarakat di daerah," imbuhnya. Di akhir, ia berharap potensi Maluku dapat dimaksimalkan melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif,

penguatan budaya lokal, serta pemerataan infrastruktur pariwisata.

Masih di Maluku, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di bidang musik. Meski demikian, masih ada tantangan yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif, seperti akses distribusi, pasar, hak cipta, dan promosi karya.

"Sebenarnya dari Kementerian Ekonomi Kreatif tadi sudah memberikan pemaparan bahwa mereka setelah inkubasi sekarang akselerasi. Karena tadi disampaikan bahwa mereka bisa produksi sendiri. Namun, distribusinya yang menjadi tantangan. Jadi, bagaimana mereka bisa memastikan ada akses kepada pasar dan pengakuan hak cipta mereka. Dan tentunya bagaimana banyak orang bisa mengetahui tentang karya-karya mereka," ujarnya usai memimpin Kunjungan Kerja ke RR Studio Kayu Putih, Ambon, Rabu (12/6/2025) silam.

"Nah, itu yang tentunya kita apresiasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Bisa hadir mengisi kekosongan di situ atau memperkuat apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif, khususnya di bidang musik," lanjutnya. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya penciptaan ekosistem ekonomi kreatif yang komprehensif dari hulu ke hilir, agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat berkarya sekaligus menikmati hasil karya tersebut.

"Untuk 5 tahun ke depan kita perlu ada ekosistem. Dan ini yang kita terus tekankan kepada Kementerian Ekonomi Kreatif. Bagaimana menciptakan ekosistem yang menyeluruh dari hulu ke hilir supaya masyarakat di manapun mereka berada di Indonesia, bisa berkarya dan menikmati hasil dari karya-karya itu," jelasnya.  hal/mh



FOTO: HIRAVEL

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati saat memimpin Kunjungan Kerja ke RR Studio Kayu Putih, Ambon, Rabu (12/6/2025).

Mereformasi Penyelenggaraan Haji

Serangkaian evaluasi dan pengawasan langsung oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Makkah, Arab Saudi, mengungkap sejumlah persoalan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.



Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri saat pengawasan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).

Temuan-temuan ini menjadi dasar kuat bagi DPR untuk mendesak reformasi fundamental, mulai dari revisi undang-undang hingga perbaikan kualitas layanan dan sumber daya manusia.

Komisi VIII DPR RI tengah menyiapkan revisi dua undang-undang vital: Undang-Undang

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Langkah ini dianggap mendesak untuk menciptakan ekosistem haji Indonesia yang lebih adaptif terhadap kebijakan terbaru dari Pemerintah Arab Saudi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri, menjelaskan bahwa revisi UU ini akan menyelaraskan regulasi



Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) Haji DPR RI Selly Andriany Gantina saat pemantauan ibadah haji di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (6/6/2025).

dengan kebijakan Saudi, termasuk larangan visa non-haji masuk ke kota suci. "Dua undang-undang ini akan diubah secara sinergis. Kami perlu mendalami lebih jauh agar revisi yang dilakukan bisa menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari Arab Saudi, termasuk soal visa non-haji yang kini dilarang masuk ke kota suci," ujar Abidin di Makkah, Sabtu (7/6/2025) lalu.

Abidin juga menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan keuangan haji. Ia mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menghadirkan terobosan investasi yang secara langsung menguntungkan ekosistem haji, mencakup layanan perhotelan, transportasi, dan konsumsi.

"Ekosistem haji itu mencakup layanan perhotelan, transportasi, hingga konsumsi. Itu semua harus jadi sasaran investasi yang dikelola secara profesional dan syar'i. Jangan sampai dana setoran jemaah tidak memberi manfaat optimal," tegasnya, seraya

menekankan prinsip syariat Islam dalam pengelolaan dana.

Profesionalisme Petugas Haji

Sementara, Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina, menyoroti masih banyaknya petugas haji, khususnya Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), yang tidak menjalankan tugas secara maksimal. Ia menemukan banyak petugas yang seolah hanya "aji mumpung" dan lebih fokus beribadah daripada melayani jemaah.

"Terlihat di lapangan, banyak petugas yang menjalankan tugas hanya sebagai aji mumpung. Mereka ke Saudi untuk berhaji, bukan fokus melayani jemaah. Padahal, tugas mereka sangat penting," ujar Selly di Mina, Jumat (6/6/2025) lalu. Selly menilai pelatihan petugas saat ini belum memadai, bahkan ada petugas yang tiba di Arab Saudi setelah jemaah.

Ia mendesak Badan Penyelenggara Haji (BP Haji),



Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Fikri Faqih, saat rapat evaluasi pelaksanaan haji 2025 di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025).

yang akan mengambil alih penyelenggaraan haji pada tahun 2026, membentuk badan diklat khusus guna mencetak petugas haji yang terstandar, terlatih, dan

memiliki kualifikasi tinggi, termasuk kemampuan dasar seperti bahasa Arab dan pemahaman teknis lapangan. Selly juga mendorong penggunaan teknologi geotagging dan aplikasi pelaporan berkala untuk memantau kinerja petugas secara real-time.

Layanan Transportasi dan Digitalisasi

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, mengungkapkan kekecewaan atas penggunaan bus yang tidak sesuai kesepakatan untuk pengangkutan jemaah menuju Arafah. Ia mendapati bus shalawat dan bus sekolah masih digunakan. Padahal, seharusnya menggunakan bus masyair yang khusus disiapkan untuk puncak ibadah haji (Armuznah).

"Ya, kita tentu kecewa. Bus yang digunakan itu tidak seperti yang kita putuskan, yaitu bus masyarakat. Bukan bus sekolah, bukan pula bus shalawat," tegas Marwan di Makkah, Rabu (4/6/2025) lalu. Ia menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan sesuai rencana dan komitmen awal untuk kenyamanan jemaah.

Sementara itu, Anggota Timwas Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyoroti persoalan klasik hingga tantangan digitalisasi dalam tata kelola haji. Fikri memetakan tiga masalah utama: problem visa yang perlu ditangani lintas kementerian (Imigrasi Kemenkumham dan Kemenlu), dominasi syarikah (perusahaan swasta Arab Saudi) dalam layanan teknis haji yang perlu dipertimbangkan model business to business (B2B), serta tantangan digitalisasi melalui platform nusuk yang diterapkan Arab Saudi.

"Isu visa memang global, tapi ini harusnya menjadi concern bersama. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri juga harus ikut mengelola bab ini," tegas Fikri dalam rapat evaluasi di Makkah. rdn/mh



Anggota Timwas Haji DPR RI Marwan Dasopang, saat memantau proses penjemputan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Arafah di Jarwal, Sektor 7, Hotel 701, Makkah, Rabu (4/6/2025).



Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene (X), saat memimpin kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/6/2025).

Temuan ini diperoleh dari serangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Komisi IX ke Manado (Sulawesi Utara), Manokwari (Papua Barat), dan Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Pencegahan PMI Ilegal

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, dalam kunjungannya ke Manado, Sulawesi Utara, menyoroti peran vital pemerintah daerah, dari provinsi hingga desa dan kelurahan, dalam mencegah pengiriman PMI ilegal. Ia mengungkapkan bahwa banyak kasus tragis yang menimpa PMI belakangan ini bermula dari masalah administrasi di tingkat akar rumput.

"Penting sekali peran pemerintah daerah sampai tingkat desa. Kenapa? Karena biasanya mereka yang mengeluarkan izin untuk warga bisa keluar negeri. Di sinilah kita harus gencar menyosialisasikan bahaya PMI ilegal agar tidak ada lagi korban berjatuh," tegas Felly usai memimpin kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/6/2025). Lalu,

Felly menjelaskan bahwa banyak

Komisi IX DPR RI Desak Peningkatan Pelindungan PMI

Komisi IX DPR RI menyoroti berbagai isu krusial terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelayanan kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara, belum memahami betul risiko besar bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Mereka sering tergiur iming-iming uang dari calo tak bertanggung jawab. Padahal, di baliknya ada ancaman yang bisa berakhir tragis, bahkan terjebak dalam perbudakan modern di negara-negara seperti Kamboja. PMI ilegal ini kerap dipaksa bekerja di lingkungan kriminal, seperti penipuan online

terorganisir.

Yang mengkhawatirkan, Sulawesi Utara menduduki peringkat kedua sebagai provinsi pengirim PMI ilegal terbanyak setelah Sumatera. Felly menekankan, edukasi dan sosialisasi tentang migrasi aman harus dilakukan secara masif, dimulai dari tingkat paling bawah. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif mengidentifikasi warganya yang berpotensi menjadi korban

perdagangan manusia berkedok peluang kerja.

"Mari kita saling peduli. Mereka yang mau pergi itu harus dipahami betul mau pergi ke mana. Jangan sampai mereka pergi sebagai turis, tapi sebenarnya mau bekerja. Ini juga harus hati-hati," pungkasnya.

Penanggulangan Stunting

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, dalam kunjungannya ke Manokwari, Papua Barat, menyoroti tingginya angka kematian bayi yang disebut lebih tinggi dibandingkan angka kematian ibu di Kota Manokwari. Hal ini disebabkan keterbatasan alat medis di rumah sakit setempat, khususnya peralatan untuk penanganan bayi baru lahir. Nihayatul mendorong pengadaan alat-alat kesehatan ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Permasalahan yang kita temui ini harus segera diatasi melalui pengusulan pengadaan alat-alat kesehatan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan bahwa pengajuan DAK tersebut bisa dimulai pada bulan Juni dan Juli tahun 2026," ujar Nihayatul saat melakukan Kunjungan kerja reses ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari, Rabu, (28/5/2025).



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, saat melakukan Kunjungan kerja reses ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari, Rabu, (28/5/2025).

Selain persoalan alat medis, politisi PKB ini juga mengungkapkan kendala dalam pembangunan infrastruktur rumah sakit, karena kurangnya tenaga konsultan. "Mereka ingin membangun beberapa gedung rumah sakit, tapi tidak tahu harus mulai dari mana karena tidak punya konsultan. Maka, saya minta Kementerian Kesehatan memberikan kontak yang bisa membantu mereka, dan difasilitasi pertemuan via zoom," kata Nihayatul.

Sementara itu, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menemukan beberapa permasalahan krusial

terkait pelayanan kesehatan. Meskipun capaian program pemeriksaan kesehatan gratis cukup baik, akses internet yang terbatas di beberapa wilayah menyebabkan kesulitan dalam menginput data.

"Akses internet yang terbatas menjadi penghambat utama, terutama di daerah yang blank spot. Komisi IX DPR RI akan mendorong Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar infrastruktur jaringan internet dapat dipenuhi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau," tegasnya.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah stunting. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan ada peningkatan angka stunting di NTB. Putih menegaskan, komitmen Komisi IX mendukung pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam upaya intervensi penanggulangan stunting. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, BKKBN, hingga BPOM dalam program makan bergizi gratis, serta meminta agar para pekerja di dapur program ini mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. [aas,mi,rnm/mh](#)



Wakil Ketua Putih Sari saat memimpin kunjungan kerja di Lombok, NTB, pada Rabu (28/5/2025).

Mewujudkan Pendidikan Dasar Gratis

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya mendorong implementasi pendidikan dasar gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pendidikan dasar (SD dan SMP) wajib diselenggarakan secara gratis.



Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati saat kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Denpasar, Bali, Rabu (28/05/2025).

Komitmen ini juga disertai dengan upaya pembenahan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan marginal. Dalam kunjungan kerja reses ke Denpasar, Bali, Wakil Ketua

Komisi X DPR RI My Esti Wijayati, menjelaskan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga harus segera diterjemahkan dalam regulasi nasional, seperti Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dan peraturan turunannya.

"Hari ini kita harus berpikir serius dan mulai menerjemahkan Putusan MK. Pendidikan dasar, baik SD maupun SMP, harus gratis. Tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta. Ini adalah keputusan final," ujarnya usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025) lalu.

Namun, Esti juga mengakui ada kekhawatiran dari pihak sekolah swasta terkait pembiayaan operasional. Ia menegaskan, perlu perumusan skema pembiayaan yang realistis bersama kementerian terkait. Ia juga menyoroti rendahnya alokasi anggaran bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang saat ini hanya sebesar Rp33 triliun dari total lebih dari Rp740 triliun anggaran pendidikan nasional.

"Ada pos-pos anggaran lain yang bisa kita realokasikan untuk mendukung pendidikan dasar gratis sesuai amanat MK," tambahnya.

Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman, menyoroti kondisi fisik sekolah yang masih memprihatinkan. Saat meninjau SMAN 15 Palembang, Komisi X menemukan kerusakan pada atap dan jendela kelas yang mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar.

Sebaliknya, SMAN 3 Palembang dinilai memiliki fasilitas yang memadai dan lingkungan belajar yang mendukung. "Komisi X mencatat ada kebutuhan mendesak untuk revitalisasi kelas. Beberapa ruang kelas mengalami kerusakan cukup serius seperti atap yang bocor dan kaca jendela yang pecah, sehingga perlu segera diperbaiki demi kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar," katanya di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025) lalu.

Mahfudz juga menegaskan pentingnya kepemimpinan kepala



FOTO: TAUJAN/VEL

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan saat kunjungan kerja ke salah satu sekolah di Sumatera Utara, Rabu (28/5/2025).

sekolah sebagai manajer profesional yang mampu meningkatkan mutu pendidikan, serta perlu penerapan teknologi tradisional yang relevan dalam proses pendidikan. "Seluruh aspirasi dan masukan hasil kunjungan akan dibawa ke pusat untuk

dijadikan bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan yang lebih solutif dan tepat sasaran. Komisi X DPR RI berkomitmen terus mengawal pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,

khususnya generasi muda Indonesia," tegasnya.

Sementara kunjungan ke Deli Serdang, Sumatera Utara, Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk dua Panitia Kerja (Panja), yaitu Panja Pendidikan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL), serta Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal. Panja ini bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Meskipun data BPS menunjukkan Provinsi Sumatera Utara memiliki rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang lebih tinggi dari angka nasional, Sofyan tetap menyorot soal rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di wilayah terpencil seperti Nias Selatan yang hanya 91,79%, di bawah angka nasional 96,17%.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas pendidikan. "Kami berharap ke depan kualitas pendidikan juga bisa terus ditingkatkan," tegasnya.

— upi,mri,tn/mh



FOTO: MENTARI/VEL

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman (X), saat memimpin tinjauan ke museum dan beberapa sekolah negeri di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025).

Menguatkan UMKM dan Literasi Keuangan di Timur Indonesia

Komisi XI DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat sistem keuangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah timur Indonesia melalui serangkaian kunjungan kerja spesifik ke tiga provinsi: Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

Dalam kunjungan ini, DPR RI menggandeng sejumlah mitra strategis, seperti OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan daerah, guna mendalami isu-isu krusial di sektor keuangan, UMKM, dan literasi masyarakat.

Di Lombok Tengah, NTB, Komisi XI yang dipimpin Wakil Ketua Fauzi Amro menyoroti pentingnya kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pertemuan dengan OJK, perbankan,



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro (X), saat memimpin pertemuan di ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta.

“

Pentingnya pendekatan menyeluruh dalam mendukung UMKM, bukan hanya dari sisi pembiayaan

Fauzi Amro
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

dan lembaga keuangan lainnya, Fauzi menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang perlu terus diperkuat, terutama melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Fauzi memaparkan bahwa dari total sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia, NTB memiliki sekitar 324 ribu UMKM. Di provinsi ini, dana yang telah dikucurkan untuk UMKM melalui skema KUR mencapai Rp22 triliun. Sedangkan untuk sektor non-UMKM sebesar Rp50 triliun. Artinya,

total perputaran pembiayaan sektor UMKM dan non-UMKM mencapai Rp72 triliun di NTB.

Ia juga menegaskan, pentingnya pendekatan menyeluruh dalam mendukung UMKM, bukan hanya dari sisi pembiayaan. "Dari dulu masalah utama UMKM adalah permodalan, legalitas, literasi keuangan, dan masalah klasik UMKM bukan hanya soal modal, tapi juga literasi keuangan, legalitas usaha, dan kemampuan manajerial. Kehadiran kami di sini untuk menjawab kegelisahan itu," ujar Fauzi.



Lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif akan menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan sektor riil

Mukhamad Misbakhun
Ketua Komisi XI DPR RI

Sementara di Denpasar, Bali, Komisi XI menaruh perhatian pada rendahnya literasi masyarakat terhadap peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Anggota Komisi XI, I Dewa Gde Agung Widiarsana, menekankan bahwa edukasi publik mengenai perlindungan dana simpanan sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, terutama di wilayah yang mengandalkan sektor pariwisata dan UMKM seperti Bali.

"LPS berperan vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya bagi masyarakat Bali yang sebagian besar bergantung



Anggota Komisi XI DPR RI, I Dewa Gde Agung Widiarsana, saat bertukar cenderamata di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI bersama LPS di Denpasar, Bali.

pada sektor UMKM dan pariwisata," ujarnya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI bersama LPS di Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2025) lalu.

Ia juga mendorong LPS bekerja sama dengan lembaga pendidikan, bank lokal, dan komunitas adat setempat dalam menyelenggarakan program literasi keuangan berbasis kearifan lokal. Di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memimpin kunjungan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk

meninjau pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Misbakhun menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, termasuk dalam menciptakan ruang gerak bagi UMKM. "Lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif akan menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah," ujar Misbakhun di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu (30/4/2025) lalu.

Misbakhun menjelaskan, kunjungan ini bertujuan menggali data dan informasi mengenai implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). "Oleh karena itu, dalam kunjungan ini kami ingin memperdalam pemahaman terkait pelaksanaan kebijakan likuiditas makroprudensial oleh BI dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi NTT, khususnya di Labuan Bajo," imbuh politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. [tn.gys,man/mh](#)



Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu (30/4/2025).

Panja Lingkungan Hidup Pantau Implementasi Regulasi

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan strategis di sektor lingkungan hidup, Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII melakukan pengawasan implementasi regulasi lingkungan serta mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan. Ini diorientasikan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan.



Anggota Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI Mulyadi (X) meninjau langsung pengelolaan limbah di area operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau, Kamis (8/5/2025).

Pada kunjungan kerja ke Riau, Anggota Panja Lingkungan Hidup, Mulyadi melakukan peninjauan langsung operasional industri pulp dan kertas milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), anak usaha APRIL Group yang merupakan salah satu produsen

pulp terbesar di Indonesia. Kapasitas produksinya sudah mencapai 2,8 juta ton per tahun dan kertas lebih dari 800.000 ton per tahun.

"Kita kunjungan mendadak atau sidak ya, hadir di sana, sengaja tidak melakukan pemberitahuan bersama Gakkum, KLHK. Komisi XII tadi ingin melihat seperti apa pengelolaan

limbah yang dilakukan oleh sebuah industri yang cukup besar di Riau ini," kata Mulyadi kepada Parlemenaria di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/5/2025) silam.

Menjelaskan hasil kunjungannya, Mulyadi mengatakan ada indikasi pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



FOTO: PUNTHO/VEL

Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano saat Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025).

Meski belum dapat dipastikan secara teknis karena harus melalui proses pengambilan sampel dan pengecekan teknis terlebih dahulu. Ia menambahkan, Panja Lingkungan Hidup ingin memastikan tidak ada masyarakat yang menemukan atau menjadi korban akibat pengolahan lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan industri memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian, namun tidak boleh mengabaikan aspek-aspek lingkungan. "Jadi, dua-duanya perlu kita dorong, industri harus tetap berkembang, tapi di satu sisi juga mereka harus tetap mentaati aturan-aturan pengolahan lingkungan," harap politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Pertambangan yang Merusak

Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano menyuarakan kegeramannya terhadap maraknya aktivitas pertambangan yang merusak

lingkungan di berbagai daerah. Rico secara tegas mendesak direktur utama perusahaan dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak lagi bersikap lunak terhadap para pelaku tambang nakal.

"Kita tidak bisa lagi hanya mendengarkan laporan yang menyebut semuanya baik-baik saja, sementara fakta di lapangan jauh dari itu," ujar Rico di hadapan delegasi kunjungan kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025) lampau.

Lebih lanjut, politisi Fraksi PKB tersebut menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang. Menurutnya, tanpa sikap tegas dari Kementerian Lingkungan Hidup, persoalan ini akan terus berlarut-larut dan semakin merugikan masyarakat.

"Jika Kementerian Lingkungan Hidup benar-benar tegas, maka

persoalan tambang yang merusak lingkungan ini pasti bisa diselesaikan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban," tegasnya.

Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat ini juga menyoroti efektivitas pertemuan dan rapat yang selama ini digelar tanpa diiringi dengan langkah nyata di lapangan. "Kalau tidak ada tindakan tegas, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Percuma kita rapat dan bertemu terus menerus, hasilnya nol," tandas Rico.

Menutup pernyataannya, Rico mendesak Kementerian Lingkungan Hidup segera menjatuhkan sanksi keras kepada perusahaan tambang yang terbukti melakukan perusakan lingkungan. Rico menilai bahwa ketegasan dan konsistensi dalam penegakan hukum adalah kunci dalam menyelamatkan lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak buruk pertambangan ilegal.

bia,pun/mh

Melindungi Para Saksi dan Korban Tindak Pidana

Negara selalu diserukan hadir melindungi para saksi dan korban pada kasus tindak pidana. Dari rehabilitasi fisik, mental, sampai keamanan perlu diberikan bagi para saksi dan korban. Inilah isu penting yang disurakan terus dalam agenda revisi UU No.13/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Komisi XIII DPR RI sedang menyerap banyak masukan dan padangan untuk merumuskan UU PSK.



Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, saat memimpin kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (26/04/2025).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, menyerukan negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (26/04/2025) silam.

"Negara harus hadir menjamin

seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam Revisi UU ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang berbelit-belit," ujar Sugiat..

Dalam kesempatan tersebut, Komisi XIII berdialog langsung dengan para korban dan penyintas dari berbagai kasus, salah satunya Chusnul Chotimah, penyintas tragedi Bom Bali I. Chusnul mengungkapkan

kekhawatirannya terkait isu efisiensi anggaran di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menurutnya sangat berperan penting dalam proses pemulihan para penyintas.

"Saya menyampaikan pesan dari teman-teman penyintas tragedi bom Bali I, agar DPR menimbang ulang soal efisiensi anggaran bagi LPSK ini, Pak. Selama ini, hanya LPSK yang benar-benar hadir untuk kami," kata Chusnul. Ia menambahkan,



FOTO: RUNI/VEL

Anggota Komisi XIII DPR RI, Sohibul Iman, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (26/4/2025).

meskipun telah mendapatkan fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan medis para korban.

"KIS itu tidak meng-cover semua, seperti penyakit kulit akibat luka bakar. LPSK yang akhirnya meng-cover seluruh kebutuhan medis kami, bahkan hingga ke obat-obatannya," jelasnya. Chusnul juga berbagi kisah tentang bagaimana kompensasi dari LPSK membantunya tetap bertahan hidup di tengah keterbatasan fisik yang dialaminya pasca peristiwa Bom Bali I. "Saya cacat, Pak. Tidak bisa melamar pekerjaan normal. Namun, dengan kompensasi dari LPSK, kami bisa membuka usaha dan bertahan hidup," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sugiat memastikan bahwa efisiensi anggaran yang direncanakan tidak akan menyentuh layanan inti terhadap saksi dan korban. "Efisiensi

“

Dengan revisi UU ini, perlindungan terhadap saksi dan korban semakin kuat. Hak-hak korban harus benar-benar terlindungi, dan para saksi bisa lebih berani bersuara

Sohibul Iman
Anggota Komisi XIII DPR RI

hanya menyasar hal-hal seperti perjalanan dinas yang tidak perlu dan belanja alat kantor. Untuk layanan kepada saksi dan korban, kami

pastikan tidak akan terganggu," tegasnya.

Sementara di Yogyakarta, isu yang sama juga dibicarakan. Komisi XIII berkunjung ke Kantor Wilayah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Yogyakarta, Sabtu (26/4/2025) silam. Audiensi dihadiri Wakil Ketua LPSK Antonius Prijadi Soesilo Wibowo dan Wakil Ketua LPSK Mahyudin, serta melibatkan perwakilan mitra kerja dan masyarakat. Sejumlah isu strategis mengemuka dan menjadi catatan penting dalam penyempurnaan regulasi perlindungan saksi dan korban.

Anggota Komisi XIII DPR RI Sohibul Iman, menyampaikan harapannya agar revisi undang-undang tersebut dapat memberikan jaminan hukum yang lebih kuat. "Saya berharap, dengan revisi UU ini, perlindungan terhadap saksi dan korban semakin kuat. Hak-hak korban harus benar-benar terlindungi, dan para saksi bisa lebih berani bersuara karena merasa aman di bawah payung hukum yang jelas," ujar Sohibul.

Salah satu perhatian utama adalah penguatan struktur kelembagaan LPSK hingga ke tingkat provinsi. Saat ini, LPSK baru memiliki dua kantor wilayah, yaitu di Yogyakarta dan Sumatera Utara. Pemerataan kehadiran LPSK di seluruh daerah dinilai penting untuk menjamin akses perlindungan hukum yang lebih luas.

Kompleksitas proses restitusi juga menjadi sorotan. Banyak korban kejahatan belum memperoleh haknya karena pelaku tidak mampu membayar ganti rugi. Untuk itu, muncul dorongan agar revisi undang-undang mencantumkan mekanisme alternatif atau "subsider" guna menjamin hak korban, termasuk dalam kasus-kasus di luar kekerasan seksual dan perdagangan orang.  [est,rni/mh](#)



FOTO: OJI/VEL

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus (X) foto bersama usai RDPU yang melibatkan hampir seluruh asosiasi pengemudi transportasi online di Tanah Air di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Sebagai Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Adian tidak hanya mendengarkan. Ia turun, berdiskusi, dan melawan ketidakadilan yang dialami para pengemudi ojek online (Ojol). "Perjuangan kita menurunkan potongan aplikator ke 10 persen bukan semata soal angka. Ini tentang masa depan anak-anak mereka, tentang keadilan," tegas Adian dalam sebuah forum diskusi bersama komunitas Ojol, belum lama ini.

Adian menginisiasi *Forum Group Discussion* (FGD) yang mempertemukan para driver dengan anggota DPR lintas komisi. Tujuannya bukan sekadar seremonial, melainkan membangun basis data aspirasi sebagai dasar kebijakan yang konkret. Ia mengingatkan: perjuangan tidak

DPR Gugat Dominasi Aplikator Ojol

Di tengah derasny arus digitalisasi dan *gig economy*, suara-suara sunyi para pengemudi ojek *online* kerap terpinggirkan. Mereka melaju membelah kota, mengantar penumpang dan barang, namun di balik layar aplikasi, terdapat keresahan. Potongan yang mencekik, status hukum yang mengambang, dan kesejahteraan yang nyaris tak terjamah. Dari dalam gedung parlemen, suara wakil rakyat dengan lantang muncul—Adian Napitupulu.



bersuara lantang soal perlindungan sosial. Ia menuntut agar pemerintah segera menyusun skema jaminan sosial yang mencakup para driver Ojol. "Mereka adalah pekerja informal yang menopang ekonomi digital, tapi tidak mendapat akses ke BPJS maupun THR," ucap Netty dalam sebuah rapat kerja bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

Isu lain yang ramai diperjuangkan adalah keselamatan dan kelayakan kendaraan. DPR menekankan agar aplikator bertanggung jawab memverifikasi kondisi kendaraan mitra. Tak jarang, pengemudi menggunakan motor tua demi



Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI bersama para driver aplikasi transportasi online, Rabu (21/5) di Senayan, Jakarta.



Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR dengan para pengemudi aplikasi transportasi online di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).



Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Netty Prasetyani Aher, dalam foto bersama usai rapat dengar pendapat bersama perwakilan Koalisi Ojol Nasional, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (23/4/2025).

cukup hanya emosional, tapi harus disertai argumentasi dan angka.

Dalam rapat dengar pendapat dengan perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim, Adian mengekritik keras sistem kemitraan yang timpang. Ia menyebut perusahaan terlalu leluasa mengambil keuntungan tanpa tanggung jawab. "Mereka tak menyediakan pool, tak memelihara kendaraan, tapi memotong hingga 20–30 persen dari pendapatan mitra," ungkap Adian. "Itu bukan kemitraan. Itu penindasan terselubung."

Simpaty juga datang dari Ketua

Komisi V DPR RI Lasarus. Ia berdiri di barisan yang sama. Dalam rapat resmi dengan Kementerian Perhubungan, ia mendorong revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) agar mencakup angkutan daring sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Lasarus menyerukan, perlu dasar hukum kuat agar driver Ojol tidak terus berada dalam wilayah abu-abu. "Negara tidak boleh membiarkan jutaan rakyatnya bekerja tanpa perlindungan hukum," tegasnya.

Tak hanya itu, Netty Prasetyani Aher, anggota Komisi IX DPR RI, turut

bertahan hidup, tanpa dukungan teknis dari aplikator.

Melalui semua rangkaian advokasi ini, terlihat DPR RI, perlahan tapi pasti, membuka ruang perjuangan bagi para pengemudi Ojol. Tidak semua berjalan mulus. Tekanan dari perusahaan besar, kompleksitas regulasi, dan dinamika politik menjadi tantangan tersendiri. Namun, bagi Adian, perjuangan belum selesai.

"Kita tidak akan lelah. Negara harus hadir. Jangan biarkan rakyat bertarung sendiri di jalanan demi sesuap nasi," tutupnya dengan suara penuh tekad. **ssb**

Membangun Kerja Sama Anggota BRICS

Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI telah menorehkan jejak penting dalam Forum Parlemen BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan) yang berlangsung di Brasilia, Brazil, pada 3-5 Juni 2025. Di bawah kepemimpinan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Indonesia secara aktif menyuarakan pentingnya penguatan kerja sama di berbagai sektor krusial guna menghadapi lanskap global yang semakin kompleks dan dinamis.

Mardani Ali Sera secara tegas menyoroti urgensi peningkatan perdagangan dan investasi, transfer teknologi, serta kerja sama di bidang keuangan di antara sesama negara anggota BRICS. Menurutnya, sinergi ini bukan sekadar pendorong



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam Forum Parlemen BRICS yang tengah berlangsung di Brasilia, Brasil, Selasa (3/6/2025).

negara-negara berkembang. BRICS memiliki potensi luar biasa untuk menjadi motor penggerak penguatan kembali multilateralisme di tengah ketidakpastian global yang kian marak akibat kebijakan ekonomi sepihak yang seringkali merugikan," papar Mardani beberapa waktu silam.

Dalam sesi terpisah yang secara khusus membahas aliansi antarparlemen BRICS untuk kesehatan global, Mardani menyerukan komitmen yang lebih kuat dari BRICS terhadap keamanan kesehatan global. Ia menggarisbawahi perlu pengembangan kapasitas, pembagian sumber daya medis, dan penciptaan akses yang setara terhadap vaksin, khususnya bagi

“

BRICS memiliki potensi luar biasa untuk menjadi motor penggerak penguatan kembali multilateralisme

Mardani Ali Sera
Ketua BKSAP DPR RI

negara-negara berkembang yang seringkali paling rentan.

Mardani menegaskan bahwa kerja sama kesehatan global merupakan upaya esensial untuk



Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadluloh (kanan), dalam Forum Parlemen BRICS di Brazilia, Brazil.

FOTO: IST/VEL

melindungi populasi dunia dari risiko penyakit menular yang dapat menyebar dengan sangat cepat, sebagaimana yang telah terbukti selama pandemi COVID-19. Ia juga menyambut baik inisiatif BRICS, di bawah kepemimpinan Brazil, untuk membangun kemitraan global yang berfokus pada populasi rentan demi mengeliminasi penyakit-penyakit yang ditentukan secara sosial (socially determined diseases - SDDs) dan penyakit tropis yang terabaikan (neglected tropical diseases - NTDs).

Menurut Mardani, upaya ini akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 6 (Air

Bersih dan Sanitasi), dan Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan), serta mengatasi perubahan iklim.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadluloh, sebagai bagian dari delegasi, memberikan penekanan khusus pada urgensi investasi dan transfer teknologi guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan investasi dan transfer teknologi dalam beberapa kebijakan strategis, seperti untuk mendukung program hilirisasi yang kini menjadi fokus utama pemerintah.

"BRICS dapat mendorong terciptanya kesempatan untuk terjalinnya kerja sama investasi dan transfer teknologi antara Indonesia

dengan negara-negara anggota BRICS lainnya, khususnya, yang diperlukan untuk mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah," tutur Hussein Fadluloh, politisi muda dari Partai Gerindra.

Kehadiran delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Mardani Ali Sera dalam Forum Parlemen BRICS ini menggarisbawahi komitmen kuat Indonesia untuk berperan aktif dalam forum-forum multilateral.

Partisipasi ini juga menegaskan upaya Indonesia dalam mendorong kerja sama yang lebih erat dan strategis di antara negara-negara berkembang, demi tercapainya stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan bersama di kancah global. rmm/mh

Ober Rumburen Sosialisasi Makan Bergizi Gratis



Anggota DPR RI Ober Rumburen sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Manokwari pada Mei 2025.

FOTO: IST/VEL

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ober Rumburen, menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua, khususnya di Papua Barat. Hal ini disampaikan saat kegiatan sosialisasi bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) di Manokwari, akhir Mei lalu.

Dalam sambutannya, Ober menyebutkan bahwa pelaksanaan program MBG harus diawali dengan jaminan keamanan dan kenyamanan. Ia menilai, pendekatan sepihak tidak efektif, terutama mengingat masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap program tersebut.

"Kita cari dulu bagaimana

keamanan dan kenyamanan.

Daripada pelaksanaan program MBG, salah satunya adalah sosialisasi seperti ini. Kita tidak bisa bicara sepihak. Memang agak berat, karena kita tahu bahwa di Papua ini pada umumnya ada penolakan," ujar Ober.

Menurutnya, sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala suku, dan berbagai elemen adat sangat penting agar masyarakat memahami manfaat program. Ia menegaskan, MBG adalah bentuk kepedulian negara dalam menjawab tantangan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Masyarakat jangan kita bodoh-bodohi. Ini berkat untuk menjawab tantangan masyarakat. Sosialisasi harus dilakukan agar ketika dapur-dapur dibangun, yang saat ini baru ada empat dari target dua belas, tidak ada lagi penolakan," lanjutnya.

Ober juga mendorong Badan Gizi Nasional memperluas cakupan program hingga ke daerah pesisir dan pedalaman Papua, bahkan ke wilayah pegunungan, agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Ia berharap program MBG yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo dapat tuntas dalam lima tahun ke depan.

"Harus secepatnya kita kejar. program pemerintah ini harus menyentuh semua wilayah, dari kota, pesisir, sampai ke gunung-gunung," tegasnya.  we/mh



Maruli Siahaan Sosialisasikan Perlindungan Hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Maruli Siahaan, menyosialisasikan regulasi perlindungan hukum bagi para korban dan saksi di Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini diikuti masyarakat dari berbagai kelurahan, seperti Kelurahan Besar, Martubung, Pekan Labuhan, Tangkahan, Sei Mati, hingga Nelayan Indah.



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Maruli Siahaan menyosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kepada warga dari berbagai kelurahan di Kota Medan.

Maruli memaparkan isi dan semangat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini menjadi salah satu instrumen hukum penting dalam

menjamin rasa aman dan keadilan bagi para saksi maupun korban tindak pidana.

"Perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga bagian dari kesadaran kolektif kita sebagai masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,"

ungkap Maruli di hadapan para peserta sosialisasi.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolres Pelabuhan Belawan Kopol Dedy Dharma, Wakapolsek Medan Labuhan Kopol Edi Surya, Lurah Kelurahan Besar Gandi Gusri, serta Ketua PAC Partai Golkar Medan Labuhan, Mahmud. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan partisipatif.

Dalam paparannya, Maruli menekankan pentingnya keberanian dan kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang efektif. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam proses hukum tidak bisa dilepaskan dari jaminan perlindungan yang memadai terhadap keselamatan fisik dan psikis mereka.

"Kita ingin masyarakat tidak ragu melapor atau bersaksi dalam kasus hukum, karena negara hadir memberi perlindungan. Lingkungan yang aman dan beradab harus dimulai dari kesadaran individu, lalu menular ke keluarga, komunitas, hingga kota ini secara menyeluruh," jelasnya.

pun/mh

Ma'ruf Mubarak Dorong Penguatan Ketahanan Pangan

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Ma'ruf Mubarak, mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui kegiatan penanaman jagung seluas 150 hektar di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, April lalu.



Anggota DPR RI Ma'ruf Mubarak menanam jagung bersama petani untuk dorong ketahanan pangan nasional di Desa Rembun, Malang, April 2025.

Penanaman jagung tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarak, Bupati Malang M Sanusi, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat, dan para petani. Ma'ruf menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian dan desa sebagai lumbung pangan menjadi bagian dari komitmennya mendukung ketahanan pangan nasional.

"Ketahanan pangan tidak bisa dibangun dari kota besar, tetapi dimulai dari desa. Dari lahan seperti di Desa Rembun, masa depan Indonesia ditanam," ujar politisi yang akrab disapa Gus Mamak. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat dalam menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan.

Menurutnya, langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang menjadikan petani dan pembangunan

desa sebagai prioritas nasional. "Kita ingin desa seperti Rembun ini menanam harapan dan kemakmuran. Pemerintah harus hadir dan memastikan jerih payah petani dihargai," tegas Ma'ruf.

Kegiatan ini juga diisi dengan penanaman jagung secara simbolis serta dialog antara petani dengan para pemangku kebijakan. Diharapkan, kegiatan serupa dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Jawa Timur dan seluruh Indonesia.

 **tf/mh**

Lola Nelria Oktavia

Kawal Aspirasi Rakyat dan Keadilan Hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lola Nelria Oktavia, menunjukkan konsistensinya mengawal aspirasi masyarakat dan memperjuangkan keadilan hukum di daerah pemilihannya, Jawa Barat XI, yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.

Anggota Komisi III DPR RI ini, mengawal berbagai agenda keadilan di tingkat lokal dan nasional. Ia menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat yang hadir dan menyuarakan kepentingan masyarakat. "Sebagai wakil rakyat, tugas saya adalah memastikan suara konstituen saya didengar dan diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujarnya, awal Juni silam.

Dalam berbagai kesempatan, Lola aktif turun langsung ke wilayah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tokoh masyarakat, pemuda, hingga



Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia.

FOTO: IST/VEL

“

Memastikan suara konstituen saya didengar dan diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat

kelompok perempuan. Isu yang diangkat beragam, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan akses kesehatan, hingga perbaikan mutu pendidikan.

Ia menggulirkan program pelatihan dan pengembangan keahlian bagi UMKM, serta menaruh perhatian pada layanan kesehatan ibu dan anak. Di bidang pendidikan, Lola mendorong peningkatan sarana dan

penyuluhan di tingkat akar rumput.

Sebagai legislator di Komisi III, Lola juga terlibat aktif dalam pengawasan dan penanganan berbagai isu hukum di wilayahnya. Salah satunya dugaan kasus salah tangkap di Tasikmalaya, yang mencuat pada Januari 2025. Lola mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut secara adil dan transparan. **ssb/mh**

Imas Aan Ubudiah

Semangat Ekonomi Kerakyatan di Sukawening

Suasana hangat menyelimuti Pondok Pesantren An-Najaah, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, saat ratusan warga berkumpul dalam agenda bertajuk “Giat Aspirasi Masyarakat” bersama Anggota DPR RI dapil Jawa Barat XI, Imas Aan Ubudiah, belum lama ini. Politisi perempuan Fraksi PKB yang akrab disapa Teh Imas ini kembali turun langsung ke tengah masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan ini berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pelaku UMKM, perangkat desa, hingga anak-anak muda yang antusias mengikuti sesi diskusi. Acara semakin hidup dengan dialog interaktif bersama narasumber kompeten seperti Aceng Hisyam Badrussalam, pakar bioflok, dan Ahmad Rifaldi, pembudidaya jamur yang telah berhasil menembus pasar luar daerah.

Tak sekadar orasi politik, Teh Imas juga menggarisbawahi pentingnya



Anggota DPR RI Imas Aan Ubudiah saat acara “Giat Aspirasi Masyarakat” untuk dorong ekonomi kerakyatan dan penguatan UMKM di Sukawening, Garut, Juni 2025.

“

Produk-produk dari Sukawening ini luar biasa. Ada budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok, ada juga jamur konsumsi yang sudah banyak peminatnya

Ia secara konsisten menunjukkan perjuangannya atas ekonomi rakyat kecil. Mengusung tema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”, kegiatan ini menjadi wadah penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat bawah, sekaligus mendorong penguatan produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Produk-produk dari Sukawening ini luar biasa. Ada budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok, ada juga jamur konsumsi yang sudah banyak peminatnya. Tinggal kita dorong dari sisi promosi, legalitas usaha, dan akses ke pasar regional maupun nasional. Saya siap perjuangkan itu di Senayan,” tegasnya yang disambut tepuk tangan meriah.

sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri, begitu pula masyarakat. Maka pelatihan, pembinaan usaha, dan pemberdayaan UMKM, khususnya perempuan dan generasi muda, harus terus digencarkan,” tuturnya.  aha/mh

Teuku Ibrahim Gelar Dialog, Serap Aspirasi

Anggota Komisi XIII DPR RI Teuku Ibrahim menggelar pertemuan untuk berdialog langsung dengan masyarakat konstituen di dapilnya, Aceh I. Dialog ini digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat di masa reses.

Baru-baru ini, politisi yang kerap disapa Ampon Bram itu, datang menyapa dan bertemu langsung masyarakat di Aceh Besar. Kedatangannya, tidak sekadar menyapa, melainkan juga menyerap aspirasi terkait kebutuhan dan keluhan masyarakat yang

diwakilinya. Misalnya, peningkatan infrastruktur desa, pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga keadilan dalam pembangunan ekonomi di daerah.

"Kami datang bukan hanya menyapa, tetapi mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu penting agar perjuangan kami di Senayan

benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat," ujar Ibrahim.

Sebagai anggota DPR RI, Ampon Bram menekankan pentingnya partisipasi warga dalam proses demokrasi. Menurut dia, ruang dialog terbuka semacam ini menjadi landasan bagi lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik.

Menurutnya, persoalan yang dialami masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan sangat kompleks. Hal tersebut tentu menjadi perhatiannya. Tidak berlebihan jika ia bertekad terus mengawal pemenuhan kebutuhan tersebut untuk diteruskan kepada pemerintah pusat melalui kebijakan nasional.

 ayu/mh



Anggota DPR RI Teuku Ibrahim serap aspirasi masyarakat Aceh I lewat dialog langsung. Aceh Besar, Juni 2025.



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Jalal Abdul Nasir kunjungi Waste4change Bekasi, dorong pengelolaan sampah mandiri untuk lingkungan sehat dan kesejahteraan warga di Bekasi, Juni 2025.

Jalal Abdul Nasir Melihat Pengelolaan Sampah di Bekasi

Masalah sampah ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga menyangkut kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup warga. Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menggunakan mengunjungi salah satu tempat pengelolaan sampah bernama Waste4change, Kawasan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, politisi dari Fraksi PKS ini menyaksikan secara langsung proses pengolahan sampah, sejak sampah masuk hingga produk akhir hasil olahan yang sebagian besar bisa

dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu Jalal menjelaskan, target yang telah ditetapkan pemerintah bahwa persoalan sampah Indonesia harus selesai dalam lima tahun.

Sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan

sampah adalah dengan cara membangun tempat-tempat pengolahan sampah di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, masyarakat ikut dilibatkan dalam proses pengolahan sampahnya.

Masyarakat pun akan sadar bahwa sampah yang mereka hasilkan ternyata bisa bernilai ekonomi yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain tentunya juga akan mampu meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggalnya. Ia pun optimis, masyarakat akan lebih peduli terhadap lingkungan dengan cara mengolah sampah mereka sendiri secara mandiri.

"Yang harus segera dilaksanakan adalah melakukan langkah-langkah edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih siap ketika nanti ada peraturan pemerintah tentang pengolahan sampah mandiri jadi diberlakukan," ujar Jalal. Pihaknya meyakini masalah sampah bukan sekadar bau dan kotor, melainkan masa depan lingkungan yang juga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.  ayu/mh

Muazzim Akbar

Ajak Warga Lombok Sukseskan MBG

Anggota DPR RI Fraksi PAN Muazzim Akbar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat Lombok dan Lombok Timur, NTB, mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan warga kurang mampu.



Anggota DPR RI Muazzim Akbar ajak warga Lombok dukung program Makan Bergizi Gratis demi masa depan generasi sehat dan kuat di Lombok, Juni 2025.

Berdasarkan data angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” kata Muazzim.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini akan disalurkan merata ke penerima manfaat yang ada di Praya Barat Daya, Lombok. Dengan diadakannya program MBG, masyarakat juga bisa menjadi mitra Badan Gizi Nasional untuk menaikan perekonomian warga,” ucapnya.

Lanjutnya, ia menegaskan dukungan legislatif sangat penting dalam mendorong anggaran dan keberlanjutan program ini. Ia pun mengajak masyarakat ikut aktif mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG di lapangan. “Kita tidak ingin program bagus ini hanya menjadi slogan. Maka dari itu, kita perlu kerja sama semua pihak, dari pusat hingga desa,” tegas Muazzim yang disambut antusias warga.

Warga yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, termasuk para guru, orang tua, dan tokoh masyarakat pun menyambut program ini dengan gembira. Mereka berharap MBG bisa segera diimplementasikan secara menyeluruh, terutama di sekolah-sekolah dasar dan menengah yang ada di wilayah mereka. [gal/mh](#)



APB⁺ ASIA-PACIFIC BROADCASTING AWARDS 2025

28 May 2025

#AsiaPacificBroadcastingAwards



TVR P

Raih Penghargaan

TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional, dengan meraih penghargaan Asia Pacific Broadcasting+ Awards 2025 dalam kategori Government Streaming. Penghargaan ini diserahkan pada puncak penghargaan yang berlangsung di Singapura, 28 Mei lalu.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI, Indra Pahlevi, yang menyampaikan sambutan penuh apresiasi atas pengakuan tersebut. "Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Asia Pacific Broadcasting yang telah memberikan penghargaan kategori ini kepada TVR Parlemen," ujar Indra.

Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan institusional yang kuat. "Penghargaan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan terus-menerus dari Sekretariat Jenderal DPR RI," tambahnya.

Menurut Indra, pelaksanaan prinsip *Open Parliament* adalah sebuah keniscayaan di era digital yang serba cepat saat ini. "Kami sebagai Biro Pemberitaan DPR menyadari bahwa tantangan yang kami hadapi untuk mewujudkannya sungguh sangat besar," tutur mantan wartawan di salah satu harian lokal di Yogyakarta ini.

Namun, berkat kerja keras dan komitmen penuh dari seluruh kru TVR Parlemen, tantangan tersebut berhasil dilalui. "Berkat dukungan yang terus menerus dari kru TVR Parlemen untuk menggarap tantangan ini, kami berhasil berkomitmen terhadap inisiatif Open Parliament dan bahkan membawa TVR Parlemen ke arah yang lebih baik."

Indra juga menekankan makna simbolik dari penghargaan ini. "Kami juga melihat penghargaan ini sebagai simbol semakin terbukanya DPR RI, karena menunjukkan upaya DPR RI untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik," jelasnya.

Penghargaan Asia Pacific Broadcasting+ Awards merupakan bentuk apresiasi terhadap inisiatif-inisiatif unggul dalam bidang penyiaran di kawasan Asia-Pasifik.

“

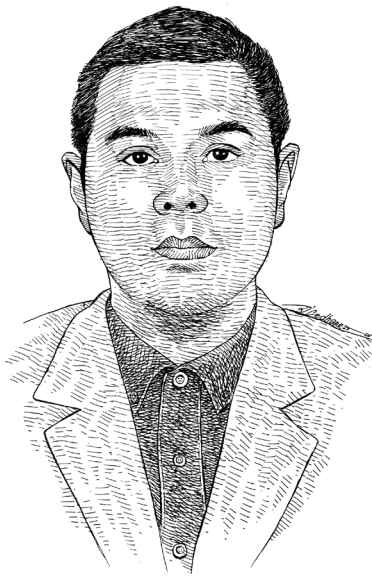
**Kami berhasil
berkomitmen
terhadap inisiatif
Open Parliament**

Program ini diselenggarakan oleh Asia-Pacific Broadcasting+ bekerja sama dengan Asian Business Review, dan telah menjadi ajang bergengsi sejak tahun 1983.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada berbagai inisiatif penyiaran inovatif yang menunjukkan keunikan, kreativitas teknologi, serta dampak signifikan bagi publik dan industri. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen DPR RI melalui TVR Parlemen dalam mewujudkan parlemen yang terbuka, informatif, dan akuntabel kepada masyarakat.

 wil/mh

**arlemen
Internasional**



Oleh:

M. Yusuf Ramadhan

Dokter di RS Akademis Jaury
Jusuf Putra Makassar

TANGGAL 14 Juni dipilih sebagai hari peringatan, karena bertepatan dengan hari lahir Karl Landsteiner, ilmuwan asal Austria yang menemukan sistem golongan darah ABO pada tahun 1900. Penemuannya ini menjadi tonggak penting dalam dunia medis, karena sebelumnya transfusi darah sering gagal akibat ketidaksesuaian darah antara donor dan penerima. Berkat Landsteiner, transfusi darah menjadi lebih aman dan mulai digunakan secara luas dalam dunia kedokteran modern.

Donor darah pertama kali dilakukan secara aman dan ilmiah pada awal abad ke-20. Saat Perang Dunia I dan II, kebutuhan transfusi darah meningkat drastis, sehingga lahirlah sistem penyimpanan darah dan bank darah pertama. Sejak saat itu, donor darah menjadi praktik medis yang menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencetuskan Hari Donor Darah Sedunia untuk menyadarkan

Manfaat Donor Darah

Setiap tanggal 14 Juni, dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia (World Blood Donor Day). Ini bukan sekadar perayaan, tapi juga bentuk penghargaan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa—para pendonor darah yang telah menyelamatkan nyawa lewat aksi sederhana namun berdampak besar: mendonorkan darah.

kita pentingnya persediaan darah yang aman, cukup, dan tersedia bagi siapa pun yang membutuhkan. Dalam kondisi darurat, seperti kecelakaan, operasi besar, atau pasien anemia kronis, darah menjadi satu-satunya penyelamat.

Apa Saja Manfaat Donor Darah?

Donor darah bukan hanya memberi manfaat bagi penerima, tapi juga berdampak positif untuk pendonornya. Berikut beberapa manfaat berdasarkan studi medis:

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Penelitian yang dipublikasikan di *Journal of the American Medical Association (JAMA)* menunjukkan bahwa donor darah secara rutin dapat menurunkan kadar zat besi dalam darah, yang jika berlebihan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.

2. Deteksi Dini Penyakit

Sebelum mendonorkan darah, kita akan menjalani pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, hemoglobin, dan lainnya. Ini bisa menjadi langkah awal untuk mendeteksi kondisi medis yang

mungkin belum kita sadari.

3. Meningkatkan Produksi Sel Darah Baru

Setelah mendonorkan darah, tubuh akan secara alami menggantikan volume darah yang hilang dengan sel-sel baru. Ini membuat tubuh lebih segar dan memperbarui sistem peredaran darah kita.

4. Meningkatkan Kepedulian Sosial

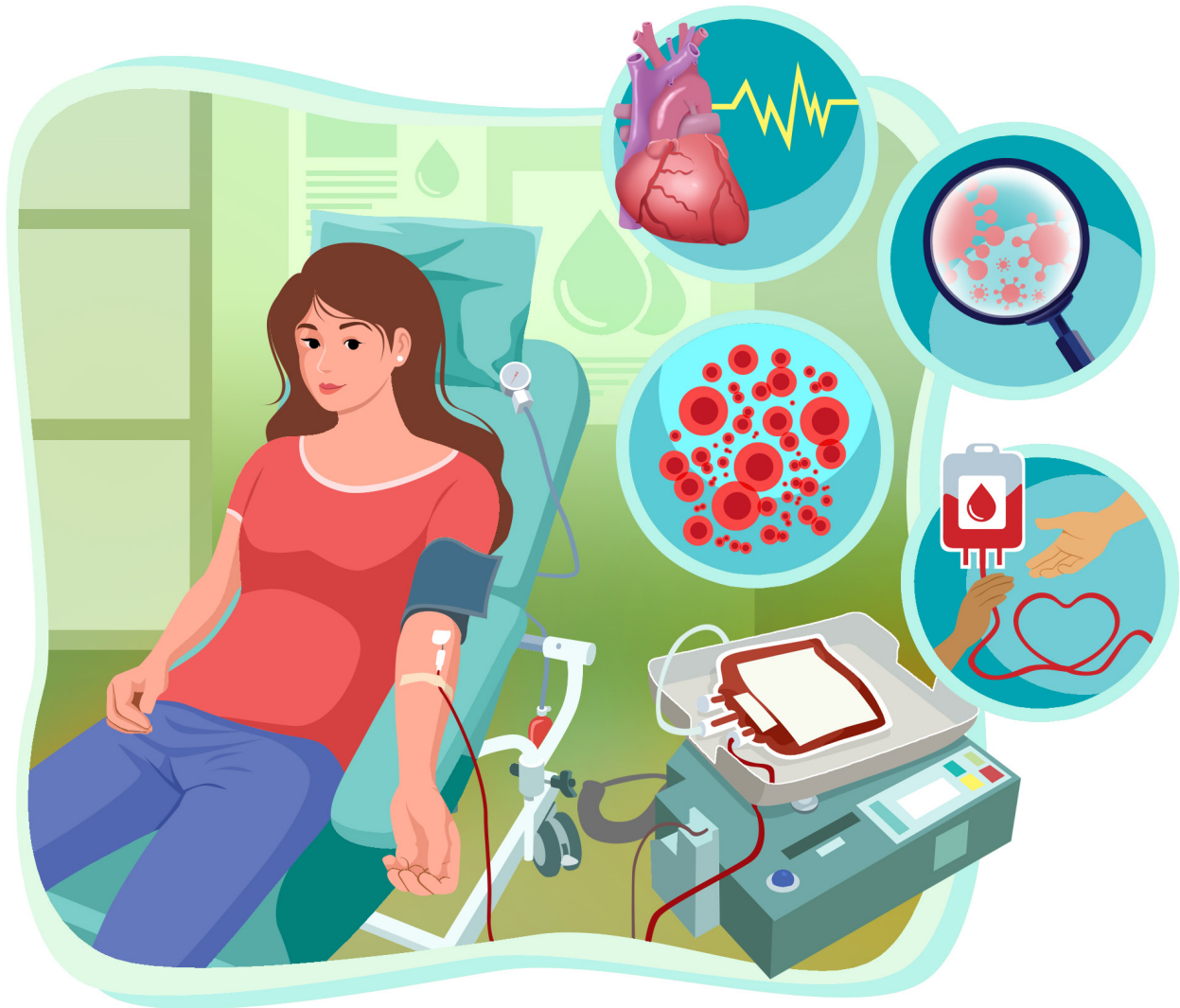
Secara psikologis, orang yang rutin mendonorkan darah merasakan rasa bahagia dan puas karena telah membantu sesama. Hal ini dikenal sebagai *helper's high*, efek positif saat kita melakukan kebaikan.

Apa Saja Syarat dan Persiapan Donor Darah?

Agar proses donor aman dan efektif, berikut adalah syarat umum dan tips persiapannya.

Syarat Umum Donor Darah:

- Usia 17–60 tahun (hingga 65 tahun jika rutin donor)..
- Berat badan minimal 45 kg.
- Tekanan darah normal (sekitar 110/70 – 160/100 mmHg).
- Kadar hemoglobin normal ($\geq 12,5$)



g/dL untuk wanita, ≥ 13 g/dL untuk pria).

- Tidak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu.
- Tidak sedang sakit atau dalam masa pemulihan.

Tips Sebelum Donor Darah:

- Tidur cukup minimal 6–8 jam malam sebelumnya.
- Sarapan ringan yang mengandung zat besi (seperti telur, roti gandum, atau sayuran hijau).
- Minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi.
- Hindari minum alkohol atau merokok minimal 24 jam

sebelum donor.

- Gunakan pakaian ber lengan pendek atau mudah digulung.

Tips Setelah Donor Darah:

- Istirahat sejenak selama 10–15 menit.
- Minum air dan makan camilan yang disediakan.
- Hindari angkat beban berat atau aktivitas fisik berat dalam 24 jam pertama.

Ayo Jadi Pahlawan Kehidupan

Satu kantong darah bisa menyelamatkan tiga nyawa. Bayangkan, dalam waktu kurang

dari satu jam, kamu bisa membuat perbedaan sebesar itu dalam hidup seseorang, entah itu ibu melahirkan, pasien kanker, atau korban kecelakaan.

Kita tidak perlu menjadi dokter untuk menyelamatkan nyawa. Dengan donor darah secara rutin setiap 3 bulan (pria) atau 4 bulan (wanita), kita sudah melakukan tindakan kemanusiaan yang luar biasa.

Jadi, di momen Hari Donor Darah Sedunia ini, mari kita sebar semangat berbagi dan peduli. Cek jadwal donor darah terdekat dan ajak keluarga, teman, atau rekan kerja ikut serta. Setetes darahmu adalah kehidupan bagi orang lain. 🌟

Labuan Bajo

dan Cerita Lainnya

Labuan Bajo memang jadi destinasi wisata andalan di republik ini. Pesona gugus pulau tropisnya tak kalah dari wisata di Vietnam. Begitu pula dengan keberadaan satwa endemiknya, komodo yang eksotis itu. Di tambah penginapan-penginapan bergaya unik mulai dari resort berdesain tradisional adat lombok sampai hotel ala-ala Positano di Itali yang menyibak kota teluk ini. Semuanya serba ada, serba memanjakan mata.

Namun apa yang dapat saya lakukan di Labuan Bajo untuk masa singgah yang tak lama. Saya putuskan saya ingin menyelami hiruk-pikuk sosial masyarakat Bajo. Tak ingin menyeberang ke Pulau Rinca atau pulau lainnya yang ramai wisatawan mancanegara itu.

Beruntung saya dapat bercakap-cakap dengan supir perjalanan

ini, Joseph (21) namanya. Ia orang Manggarai, etnis mayoritas di pulau Flores ini yang menaungi kecamatan bernama Labuan Bajo. Darinya saya tahu bahwa sektor pariwisata digemari angkatan kerja muda orang-orang Manggarai. Mereka sebagian besar memenuhi lapangan kerja di Labuan Bajo mulai dari perhotelan, restoran hingga agen travel.

Dalam perjalanan menuju gardu pandang di atas Golo Mori yang

merupakan bahasa Manggarai untuk sebutan "Bukit Tuhan", ia sangat optimistis masa depan Labuan Bajo ialah menjadi destinasi wisata internasional yang mampu menyaingi Bali. Kepercayaan diri semakin tumbuh pasca perhelatan G20 di kawasan ini. Infrastruktur seperti jalan raya yang dibangun merangsang pertumbuhan bisnis horeka di sepanjang rute tersebut.

Usai menyusuri Golo Mori dan melihat pulau Rinca dari kejauhan, kami mengarah ke pusat kota. Suasana malam semakin ramai di tepi pantai. Memang benar kata Joseph, bahwa industri pariwisata di Bajo sedang bergairah-gairahnya. Banyak hotel berbintang lima yang mewah dibangun di sekitar kota teluk ini. Tak sedikit bangunan hotel tersebut menempel pada dinding pebukitan yang mengarah pandang ke lautan, yang memang nilai jual Labuan Bajo.

Soal kawasan hotel yang menempel pada pebukitan ini pernah saya baca beritanya, mendapatkan





protes dari warga. Salah satu alasannya ialah terkait keberadaan izin Amdal. Memang perizinan terkait persoalan lingkungan ini jadi isu yang penting, mengingat pebukitan di teluk Bajo terdiri dari tumpukan tanah kapur. Kawasan yang rentan longsor serta sulit pula mendapatkan air tanah.

Saya pun bertanya-tanya, soal air bersih ini, dari mana pula industri horeka memperolehnya. Setahu saya tidak ada aliran PDAM seperti di kota-kota besar di Pulau Jawa sana. Saya pun ingin menyelami bagaimana pula masyarakat asli yang menetap di Labuan Bajo menghadapi dilema itu, antara kelestarian lingkungan dan peluang ekonomi yang menggiurkan.

Untuk itu saya memutuskan keesokan paginya mengunjungi pasar ikan Labuan Bajo. Supaya dapat melihat aktivitas orang Bajo yang dikenal sebagai pelaut handal itu. Bajo atau Bajau dan di beberapa dialek menyebutnya Wajo, merupakan kelompok masyarakat yang hidup di laut. Persebaran

mereka sangat luas, dimulai dari Filipina Selatan, Laut Sulawesi hingga pesisir di seputaran gugus pulau Nusa Tenggara Barat, salah satunya pulau Flores ini.

Nama Labuan Bajo tampaknya didedikasikan kepada mereka, sang Suku Bajo, labuan yang dalam bahasa bajo bermakna "tempat berlabuh" atau "pelabuhan" lokasi dimana kapal singgah dengan arus ombak yang tenang. Sewaktu di sekolah saya sering mendengarkan cerita kemampuan menyelam orang bajo, yang seperti suku Laut di Kepulauan Riau. Mereka mampu menahan napas di dalam air di atas rata-rata penyelam profesional yang memakai perangkat selam.

Pasar ikan saat pagi hari benar-benar sibuk. Peti es yang terbuat dari sterofoam memenuhi kapal untuk diturunkan dan diangkat para kuli ke muka pasar. Ikan-ikan yang ada, ketika peti dibuka, saya bisa pastikan kesegarannya tak diragukan. "Ikan yang mati sekali," kalau kata teman saya orang

Ambon. Bukan yang matinya berkali-kali seperti yang diperoleh di pasar-pasar di Ibukota.

Ada banyak ikan karang hingga ikan laut tengah seperti tuna bahkan ikan layar (marlin). Pasar juga ramai dengan aktivitas jual beli, selain ikan segar juga terdapat beragam ikan asin. Ada salah satu ikan yang jenisnya biasa saya temukan segar, dijual dalam bentuk asin di pasar tersebut. Saya hanya menduga, mungkin saking melimpahnya pasokan ikan jenis ini sampai-sampai tersedia jenis yang asinnya.

Perjalanan saya di pasar ikan sayangnya tak membuahkan hasil wawancara. Namun dari perbincangan saya dengan Joseph, beberapa orang asli Bajo selain melaut juga ikut serta membangun agen travel untuk wisatawan. Biasanya usaha itu dikerjakan berkelompok dengan teman sesama Bajo lainnya. Meski menggeluti sektor pariwisata, darah bahari masih begitu kental, sehingga tak jauh dari urusan laut dan kapal.

Soal kelestarian pantai dan laut di Labuan Bajo ini, saya memang menyimpan harapan besar. Saya yakin laut adalah sumber penghidupan. Makanan semua tersedia dan mereka meyakini takkan kelaparan selama laut lestari dan tak tercemar. Saya rasa kita semua berharap Labuan Bajo tak hanya jadi mutiara pariwisata dunia saja, tapi tetap ramah bagi masyarakat yang bergantung kehidupan pada lautnya. **aha**

Iduladha

Wujud Kepedulian Sosial dan Kebahagiaan Bersama

Narasi: Naefuroji • Foto: Farhan, Devi, Mario, Andri, Oji



Allahu Akbar... Allahu Akbar...!

Gema takbir syahdu mengiringi prosesi penyembelihan hewan qurban di Komplek Parlemen, Senayan, Ahad pagi (8/6/2025).

Perayaan Iduladha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas, kepedulian, serta pengamalan ajaran Islam di lingkungan kerja parlemen. Jumlah hewan kurban 20 ekor sapi, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, **Parlementaria** juga merekam kekompakan warga masyarakat di wilayah Kemayoran melakukan pemotongan hewan qurban sapi dan kambing dalam momen Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Sabtu (7/6/2025).

Hari raya Iduladha 1446 H di Masjid At-Taqwa, Pondok Surya, Karang Tengah, Tangerang melaksanakan pemotongan hewan Qurban hari Jum'at (6/6/2025) sebanyak 15 ekor sapi, dan 30 ekor kambing, dengan hasil

pemotongan hewan Qurban sebanyak 1200 kantong.

Di Depok, Lensa Parlemen membidik suasana warga saat penyembelihan hewan kurban Iduladha 1446 H di lapangan bulutangkis perumahan *Diamond Golden* Cinere Depok, Provinsi Jawa Barat. Penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan 13 ekor kambing oleh panitia Mushola AL Iman JL. H. Mursid Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Jum'at (6/6/2025).

Pelaksanaan kurban memiliki banyak hikmah, di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan, melatih keikhlasan, mempererat tali persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian sosial. Kurban juga menjadi sarana untuk mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta wujud syukur atas nikmat Allah.* 🌿









**SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Mengucapkan :

*Selamat Hari Raya
Iduladha*



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri